



Laporan Hasil Penelitian Kelompok

# **MELEMBAGAKAN EKONOMI SYARIAH MELALUI PENDIDIKAN TINGGI ISLAM SEBAGAI KAJIAN PERBANDINGAN TERHADAP SISTEM EKONOMI KAPITALISME**

**Dr. Andi Thahir, M.A.,  
Tin Amalia Fitri, M.Si.  
Erike Anggreini, M.Sy.**







**MELEMBAGAKAN EKONOMI SYARIAH MELALUI  
PENDIDIKAN TINGGI ISLAM SEBAGAI KAJIAN PERBANDINGAN  
TERHADAP SISTEM EKONOMI KAPITALISME**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN KELOMPOK**

**Oleh :**

**Dr. Andi Thahir, M.A.**

**Tin Amalia Fitri, M.Si.**

**Erike Anggreini, M.Sy.**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG**

**2015**



**SAMBUTAN KETUA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG**

---

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, kegiatan penelitian di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015, yang dilaksanakan di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Raden Intan Lampung dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dibiayai berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015.

Kami menyambut baik hasil Penelitian Kelompok yang dilaksanakan oleh saudara Dr. Andi Thahir, M.A. dkk dengan **MELEMBAGAKAN EKONOMI SYARIAH MELALUI PENDIDIKAN TINGGI ISLAM SEBAGAI KAJIAN PERBANDINGAN TERHADAP SISTEM EKONOMI KAPITALISME** yang dilakukan berdasarkan SK Rektor Nomor 72.b Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015 Tentang Penetapan Judul Penelitian, Nama Peneliti, Pada Penelitian Kelompok Dosen IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015.

Kami berharap, semoga hasil penelitian ini dapat meningkatkan mutu hasil penelitian, menambah khazanah ilmu keislaman, dan berguna serta bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan yang berbasis iman, ilmu, dan akhlak mulia.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, Desember 2015  
Ketua Lembaga Penelitian  
Dan Pengabdian Kepada Masyarakat,

Prof. Dr. H. M. Nasor, M.Si.  
NIP. 195707151987031003



## KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat Allah SWT., yang tiada henti-hentinya selalu memberikan karunia hidayah, rahmat dan barakat-Nya kepada kita sekalian. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Saw, para keluarganya dan para shahabatnya. Amin.

Alhamdulillah, peneliti telah menyelesaikan penulisan laporan penelitian yang berjudul : **MELEMBAGAKAN EKONOMI SYARIAH MELALUI PENDIDIKAN TINGGI ISLAM SEBAGAI KAJIAN PERBANDINGAN TERHADAP SISTEM EKONOMI KAPITALISME.**

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu pelaksanaan dan penulisan laporan penelitian ini sejak awal hingga akhir, Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT berkenan membalasnya dengan limpahan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya, semoga hasil penelitian ini bermanfaat adanya. Aamiin Ya Rabb Al 'Alamin.

Bandar Lampung, Nopember 2015.  
Ketua Tim

Dr. Andi Thahir, M.A.

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>SAMBUTAN KETUA LP2M</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>v</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

I.1. Latar Belakang Penelitian	1
I.2. Batasan Penelitian	10
I.3. Rumusan Masalah	11
I.4. Manfaat dan Tujuan Penelitian	11

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

II.1. Konsepsi Negara	13
II.2. Konsep Sistem Ekonomi dan Politik suatu Negara	15
II.3. Peran Negara dalam Kemajuan Sistem Ekonomi	20
II.4. Konsepsi Sistem Ekonomi Islam	22
II.5. Hubungan antara Sistem Keuangan dan Doktrin Ekonomi sebagai Kerangka Pemahaman terhadap Ekonomi Islam	32
II.6. Penggunaan Teori Kritis untuk Memahami Kemapanan Ekonomi Kapitalis	33
II.8. Relasi Pendekatan Psikoanalisa dan Kemapanan Kapitalisme	36
II.9. Pendidikan dan Proses Humanisasi	42

### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

III.1. Jenis Penelitian	45
III.2. Desain Penelitian	45
III.3. Pengujian Komponen	48
III.4. Variabel Penelitian	51



#### **BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN**

- 4.1. Menemukan Doktrin Ekonomi Islam 57
- 4.2. Perbedaan Prinsipal antara Ekonomi Islam dan Kapitalisme dalam Peraturan Aktivitas Ekonomi 66
- 4. Pelembagaan Ekonomi Islam Melalui Pendidikan Tinggi Islam 92

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan 97
- B. Saran 100

#### **DAFTAR PUSTAKA 101**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang Penelitian**

Negara adalah sekumpulan masyarakat yang terikat sebagai satu kesatuan hukum, karena factor geographi, suku, bahasa, ataupun kebudayaan. Merujuk pandangan Bertrand Russell, mengenai perlunya Negara menggunakan prinsip self-governing yaitu pemerintah sebagai organisasi yang diberikan kepercayaan untuk mengatur semua urusan masyarakat di dalam suatu Negara, tanpa ada campur tangan dari Negara lain terkait pengaturan urusan-urusan ataupun keputusan-keputusan yang tepat yang harus diambil dalam rangka menjalankan pemerintahan, yang dapat kita sebut sebagai kemandirian Negara terhadap Negara lain. Kemandirian suatu Negara menurut Russel dibutuhkan untuk menjamin kebebasan masyarakat Negara tersebut dalam mengembangkan kreatifitas didalam diri individu-individunya dan memenuhi kebutuhannya. Ketika pemerintah suatu Negara kehilangan kemandiriannya maka masyarakatnya akan kehilangan kebebasan<sup>1</sup>.

Terdapat dua factor utama dalam mencapai kemandirian suatu Negara, yaitu factor politik dan ekonomi, kedua factor ini pada dasarnya tidak dapat dipisahkan terkait keputusan mengenai

---

<sup>1</sup> Self-governing, Bertran russel: Political Ideal, Amrico, Bandung, hal: 36

factor yang harus terlebih dahulu dimajukan, kedua factor tersebut harus senantiasa dimajukan secara bersama-sama. Kebijakan ekonomi dapat mencapai keberhasilannya melalui kebijakan-kebijakan politik<sup>2</sup>. Kebijakan ekonomi yang tepat dibutuhkan untuk memenuhi fungsi Negara mendorong dan menciptakan kondisi dimana setiap anggota masyarakatnya dapat melakukan segala usaha untuk mensejahterakan dirinya, kebijakan politik yang tepat dibutuhkan untuk mencapai stabilitas dan menjamin keamanan dari dalam dan dari luar Negara saat pemerintah dan masyarakatnya berjuang memenuhi kebutuhan ekonominya.

Menggunakan kehidupan suku Tartar bangsa Arab sebagai contoh, Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nation*<sup>3</sup>, mengajukan resep politik untuk mencapai kestabilan dan keamanan Negara dan pada saat yang sama mencapai kesejahteraan negaranya. Menurut Adam Smith sebagai sebuah komunitas, Suku Tartar mempunyai system ekonomi dan politik yang mapan, yaitu pada saat mereka bekerja mencari dan memenuhi kebutuhan ekonominya dalam empat musim yang berbeda, usaha tersebut tidak akan terganggu, ketika laki-laki dari suku mereka dibutuhkan untuk berperang dengan tujuan untuk melindungi dari serangan luar, atau dalam rangka melakukan infasi mencari sumber-sumber ekonomi yang lebih luas. Dalam hal

---

<sup>2</sup> Teori Keynes: dalam Charles L. Chocram, 1995, hal: 135

<sup>3</sup> Adam Smith, *The Wealth of Nation*, Harriman House LTD, Hampsh ire, 2007, hal: 451 - 462



perang lak-laki suku tartar sangat terlatih, dan mereka mempunyai system yang mapan dalam rangka membiayai latihan tersebut dan membiayai orang-orang yang terlibat dan segala kebutuhan perang lainnya. Sebagai salah satu dari contoh kehidupan tradsional, kehidupan suku Tartar ini menjadi salah satu bahan landasan bagi Adam Smith untuk meramu system ekonomi dan system politik Negara, agar pada saat mensejahterakan dirinya, bersamaan waktu itu pula tidak mengorbankan kekuatan untuk menjaga stabilitas, melakukan perlawanan, atau melakukan perluasan sumber daya. Kita mengenal sampai saat ini, ramuan system ekonomi dan politik Adam Smith bahkan menjadi rujukan sampai saat ini. Sistem ekonomi kapitalisme sudah sangat mengakar melalui kelembagaan ekonomi yang mapan, dan mendapat dukungan dari system politiknya. Salah satu ramuannya adalah memperkuat angkatan militer dengan mendapatkan anggaran yang besar dari sektor ekonomi.

Pada posisi yang berbeda ramuan ekonomi dan politik, dalam hal ini ramuan ekonominya termanifestasi dalam system kapitalisme melahirkan kerugian pada bangsa-bangsa yang lain, dan armada militer yang kuat dari Negara-negara maju secara efektif sangat mendukung infasi negara-negara tersebut untuk memperluas sumber ekonominya ke negara-negara yang lebih lemah. Sebagai bagian dari negara yang lebih lemah yang harus dilakukan Negara Indonesia adalah bagaimana memperkuat system politik dan ekonomi, dan bagaimana kedua system tersebut

dapat saling memperkuat masing-masing. Dalam hal ini tentu saja bukan untuk tujuan turut menjadi bagian dari mereka, tetapi untuk kemandirian dan kebebasan sebagai individu dan sebagai masyarakat.

Menjelang kemerdekaan Negara Indonesia, para perumus konstitusi berjuang merumuskan system politik dan ekonomi Negara Indonesia. Selanjutnya, rumusan tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selayaknya UUD 1945 menjadi rujukan suci bagi kebijakan-kebijakan pemerintah terutama dalam hal kebijakan ekonomi dan politik. Namun pada kenyataannya, pemerintah Indonesia khususnya, dan Bangsa Indonesia pada umumnya senantiasa berdebat mengenai maksud, tujuan, dan nuansa dari UUD 1945 tersebut, dan catatan sejarah yang cukup tragis UUD 1945 di amandemen tanpa merubah suprastruktur dan infrastruktur ekonomi, politik, social, dan hukum dari Negara Indonesia, akibatnya saat ini sebagai bangsa kita jatuh pada jurang yang lebih dalam, dan ibarat kotak kado yang terbungkus indah dan rapi namun kosong di dalamnya seperti itulah system politik dan system ekonomi Negara Indonesia saat ini.

Ungkapan tersebut dapat dicari pembenarannya dalam beberapa pemaparan selanjutnya. Mohammad Hatta dalam bukunya, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*<sup>4</sup> menyatakan bahwa system ekonomi Indonesia berakar dari semangat

---

<sup>4</sup> Moh. Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indoneisa*, Djambatan, 1963, hal: 16



kolektivisme yang terkandung dalam cita-cita sosialisme, yaitu penolakan terhadap kepemilikan individu secara mutlak, dan ekonomi dibangun berdasarkan sifat saling tolong menolong, gotong royong, dan semangat kekeluargaan, dalam hal ini sifat tersebut merupakan sifat asli masyarakat Indonesia terutama yang hidup di wilayah pedesaan. Manifestasi sifat ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh penduduk desa atau wilayah pemerintahan terbawah lainnya seperti kampung atau nagari di daerah Indonesia lain<sup>5</sup>, dalam menyelesaikan pekerjaan yang menyangkut kebutuhan pemenuhan kebutuhan pribadi maupun kebutuhan bersama. Ir. Soekarno dalam bukunya *Dibawah Naungan Bendera Revolusi*<sup>6</sup> juga menyatakan bahwa sosialisme sesuai dalam sifat kekeluargaan dan gotong royong masyarakat Indonesia.

Selanjutnya Moh. Hatta mengusulkan formulasi system ekonomi Indonesia melalui dua tingkat pembangunan ekonomi, *Tingkat bawah*, yang berada di wilayah pedesaan tempat sebagian besar masyarakat Indonesia hidup, ekonomi masyarakat dibangun, didorong kemandiriannya melalui lembaga ekonomi koperasi. *Tingkat atas*, ekonomi Negara secara keseluruhan dibangun melalui perusahaan-perusahaan Negara yang mengurus dan mengatur perekonomian yang terkait dengan kebutuhan orang

---

<sup>5</sup> Van Vollen Houten, dalam *ibid*, hal: 24

<sup>6</sup> Ir. Soekarno, *Dibawah Naungan Bendera Revolusi*, Djambatan, Jakarta, hal: 124

banyak dan terkait penguasaan Sumber Daya Alam yang terkandung didalam wilayah Negara Indonesia., melalui lembaga ekonomi atau badan usaha yang disebut dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Formulasi sistem ekonomi ini selanjutnya ditetapkan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1), (2), (3).

Terkait dengan system politik, demokrasi yang diusung oleh para perumus kemerdekaan adalah demokrasi yang didasarkan musyawarah mufakat, yang dimanifestasikan dalam susunan lembaga Negara yaitu MPR adalah perwujudan kedaulatan rakyat yang menetapkan pijakan dasar pembangunan Negara Indonesia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sebagai “buku saku” bagi eksekutif untuk menjalankan roda pemerintahan. MPR terdiri dari DPR sebagai wakil-wakil dari partai politik dengan beragam kepentingan, dan DPD sebagai wakil dari daerah yang akan membungkus perbedaan kepentingan berbagai partai politik dalam kepentingan daerah. Partai politik yang sangat beragam dalam kepentingannya dalam hal ini Negara Indonesia sangat multi kultur dan multi agama akan selalu menjumpai keadaan kesulitan dalam mencapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan, maka bersama-sama DPD pembahasannya dapat diarahkan dalam bungkus kepentingan regional atau daerah, dalam lembaga tertinggi MPR dengan ketua lembaga yang merupakan pilihan dari seluruh anggota DPR dan DPD, formulasi yang lebih sederhana untuk Negara yang sangat heterogen dalam hal suku, agama, kebudayaan, dan latar belakang



sosialnya.<sup>7</sup> Kemudian formulasi ini ditetapkan dalam pasal 2 UUD 1945 yang sekarang telah diamandemen dan dirubah fungsinya.

Dengan demikian, setelah berganti-ganti pemerintahan, bangsa Indonesia tidak memahami maksud, tujuan, dan nuansa yang terkandung didalam UUD 1945 sebagai hukum dasar bagi Negara Indonesia. Para politisi yang duduk di lembaga perwakilan tidak pula memahaminya dan senantiasa terkungkung dalam perdebatan penafsiran yang tidak bermakna. Politik di Indonesia senantiasa ditautkan pada nuansa negative, lembaga ekonomi yang ada dikendarai untuk menyalurkan kepentingan golongan dan pihak lain di luar Bangsa Indonesia. Sebagai bagian dari institusi pendidikan Islam, kita harus senantiasa mengusung hasrat positif menuju perbaikan. Merujuk pemikiran Bertrand Russel<sup>8</sup> tentang dua dorongan yang ada dalam diri manusia yang pada akhirnya mempengaruhi segala tindakan manusia dalam system ekonomi dan system politik yaitu dorongan posesif (Possesive impulsive) dan dorongan kreatif (creative impulsive), dalam hal ini demi merubah keadaan, merubah system baik system ekonomi maupun system politik, maka masyarakat disuatu negara harus memiliki dorongan kreatif didalam dirinya daripada dorongan posesif, dan keadaan ini dapat dicapai melalui pendidikan yang berkualitas,

---

<sup>7</sup> Anwar Harjono, *Perjalanan Politik Bangsa*, hal 116

<sup>8</sup> Bertrand Russel, *Cita-Cita Politik*, Amrico Bandung, 1963, hal: 45

pendidikan yang member ruang seluas-luasnya bagi tumbuhnya dorongan kreatif.

Sebagaimana diungkapkan Anwar Harjono<sup>9</sup> bahwa Pancasila yang menjadi dasar falsafah Negara Indonesia, dan terkandung di dalamnya falsafah system politik dan ekonomi, merupakan manifestasi dari nilai-nilai Islam. Dengan demikian, sebagai pendidik di Pendidikan Tinggi Islam selayaknya turut ambil bagian dalam menata system ekonomi dan system politik Negara Indonesia melalui wahana pendidikan. System Ekonomi Islam sering disebut sebagai System Ekonomi Syariah saat ini mengalami kemajuan yang pesat, banyak Negara-negara maju yang telah menggunakannya, demikian pula dengan Negara Indonesia, namun dengan memakai pengalaman yang telah kita alami sendiri, yaitu kita terperosok kedalam jurang ketidakmandirian, ketergantungan, dan terbelenggu kebebasan sebagai manusia dan sebagai bangsa akibat industrialisasi serta globalisasi ekonomi dan politik, dengan menggunakan system ekonomi dan politik kita sendiri, selayaknya kita berhati-hati dalam menerapkan System Ekonomi Syariah, agar tidak terperosok kedalam jurang yang sama. Dengan demikian, patut menjadi kajian penelitian terkait pelebagaan Ekonomi Syariah melalui pendidikan tinggi Islam dengan cara memperbandingkan dengan System Ekonomi Kapitalisme.

---

<sup>9</sup> Opcid. hal. 125



Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam pada saat sedang mengalami perkembangan yang sangat signifikan di beberapa negara Islam di dunia, termasuk di Indonesia. Namun seperti halnya yang terjadi pada sistem ekonomi dan politik Pancasila, terdapat kenyataan yang perlu menjadi perhatian peneliti Islam terutama di Perguruan Tinggi Islam yaitu pernyataan yang dilontarkan oleh Tarik Eldiwany, direktur Takaful di Amerika: “ada aset yang belum tersentuh dunia keuangan modern, dan itu terpendam di dunia Islam. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, 120 milyar dollar, sehingga banyak perusahaan berlomba untuk mengelolanya, meskipun harus membuat produk keuangan Syariah. Lagi pula untuk menguasai pengetahuan tentang produk keuangan Syariah dan bermuamalah secara Islam tidak perlu menjadi orang Islam. Citibank, misalnya sudah punya Citi islamic Investment Bank di Bahrain. Bahkan Bulan Juli tahun 2000, perusahaan induknya Citicorp membuka layanan *non-interest banking*”<sup>10</sup>.

## **I.2. Batasan Penelitian**

Penelitian ini akan dibatasi pada perbandingan teori-teori ekonomi dan juga beberapa teori politik yang terkait dengan persoalan perekonomian, meliputi peran Negara dalam ekonomi, peran masyarakat dalam ekonomi, peran pasar dalam ekonomi,

---

<sup>10</sup> Cecep Maskunul Hakim, *Belajar Mudah Ekonomi Islam*, Shuhuf Media Insani, 2011, hal. 283 -284.

peran lembaga perekonomian, hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam perekonomian, yang akan diambil dari pemikir-pemikir Capitalist dan pemikir-pemikir Islam untuk diperbandingkan sebagai bahan kajian terhadap ekonomi Islam, selanjutnya menentukan muatan-muatan pendidikan yang harus ada dalam Pendidikan Tinggi Islam dalam rangka pelembagaan System Ekonomi Syariah.

### **I.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan penelitian, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Islam memiliki konsep-konsep ekonomi politik yang dapat mendorong Ekonomi Islam menjadi sebuah system ekonomi dan politik?
2. Bagaimanakah hubungan antara Pendidikan Tinggi Islam dengan pelembagaan ekonomi Islam?
3. Muatan pendidikan apa saja yang harus digunakan di Pendidikan Tinggi Islam untuk mendorong pelembagaan Ekonomi Islam?

### **I.4. Manfaat dan Tujuan Penelitian**

#### **A. Manfaat Penelitian**

1. Mendorong perubahan kondisi ekonomi di Negara Indonesia

2. Mendorong perubahan kondisi politik di Negara Indonesia
3. Mendorong pelebagaan Ekonomi Islam di Indonesia
4. Mendorong perbaikan muatan pendidikan Ekonomi Islam di Pendidikan Tinggi Islam

#### **B. Tujuan Penelitian**

1. Menetapkan teori Ekonomi Capitalist yang digunakan di Indonesia
2. Menetapkan teori politik yang mendukungnya
3. Menetapkan muatan pendidikan untuk mendorong pelebagaan Ekonomi Islam di Indonesia

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **II.1. Konsepsi Negara**

Benn dan Peters mendefinisikan negara sebagai kumpulan masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang terikat oleh suatu aturan normative yang mengatur hak dan tugas satu sama lain, menetapkan tujuan mereka dan usaha mencapainya<sup>11</sup>. Negara terdiri dari institusi-institusi pemerintah, namun demikian pemerintahan bukanlah negara, menurut Burke negara adalah suatu ide yang melintasi batas waktu, sedangkan pemerintahan ditandai oleh serangkaian krisis dan penyelenggaraan urusan.

Prof. Mr. M. Nasroen<sup>12</sup> dalam bukunya Ilmu Perbandingan Pemerintahan, mendefinisikan negara sebagai suatu bentuk pergaulan hidup, yang mempunyai syarat-syarat tertentu untuk menjadi suatu negara, yaitu harus mempunyai rakyat tertentu, daerah tertentu dan pemerintahan tertentu. Konsep lain dari negara dinyatakan oleh P.J. Bouman<sup>13</sup> dalam buku *Sociologie, begrippen en problemen*, bahwa negara adalah hasil pertumbuhan sejarah, yang berlangsung selangkah demi selangkah

---

<sup>11</sup> Florentino G Ayson & Dolores Aligada Reyes, *Fundamental of Political Science*, National Book Store, Manila, 2000, hal. 45

<sup>12</sup> Prof. Mr. M. Nasroen, *Ilmu Perbandingan Pemerintahan*, 1986, hal.33

<sup>13</sup> P.J. Bouman, *Sociologie, Begrippen en Problemen*, hal.68



dan lambat, sehingga hampir tidak ada gunanya memperbincangkan soal asal mula negara itu.

Beberapa definisi lain dari negara oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut: *Pertama*, menurut Roger H. Soltau<sup>14</sup>: “The state is an agency or authority managing or controlling these(common) affairs on behalf of and in the name of the community (Negara adalah agen atau kewewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat)”. *Kedua*; Harold J. Laski<sup>15</sup>: “The state is a society which is integrated by possessing a coercive authority legally supreme over any individual or group which is part of the society (Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat).

Berdasarkan rumusan-rumusan di atas, ditarik kesimpulan bahwa negara adalah suatu kelompok persekutuan, alat organisasi kedaerahan dan kewilayahan yang memiliki sistem politik yang melembaga dari rakyat, keluarga, desa dan pemerintah yang lebih tinggi terdiri dari orang-orang yang kuat dan memiliki monopoli, kewibawaan, daulat, hukum dan kepemimpinan yang bersifat memaksa sehingga pada akhirnya memperoleh keabsahan dari luar dan dalam negeri

---

<sup>14</sup> Roger F. Soltau, *An Introduction to Politics*, Longmans, London, 1961, hal. 1

<sup>15</sup> Harold J. Laski, *State in Theory and Practice*, The Viking Press, New York, 1947, hal. 8

serta di satu pihak memiliki kewenangan untuk membuat rakyatnya tenteram, aman, teratur, dan terkendali, sedangkan di pihak lain melayani kesejahteraan dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama<sup>16</sup>(Syafiie & Azikin,2007, hal. 21).

## **II.2. Konsep Sistem Ekonomi dan Politik suatu Negara**

Sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Pelaksanaan sistem ekonomi suatu negara tercermin dalam keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem perekonomian negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ideologi/falsafah hidup bangsa, sifat dan jati diri bangsa, serta struktur ekonomi.

Sistem ekonomi merupakan keseluruhan dari berbagai institusi ekonomi yang berlaku di suatu perekonomian untuk mengatur bagaimana sumber daya ekonomi yang terdapat di perekonomian tersebut didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Berbagai institusi ekonomi ini mengatur bagaimana dibuatnya keputusan yang menyangkut hal-hal ekonomi dan bagaimana sumber daya ekonomi dikelola agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai institusi

---

<sup>16</sup> I.K. Syafei & Azikin, *Perbandingan Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 21

ekonomi ini dapat berupa peraturan perundang-undangan ataupun kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut dalam penggunaan sumber daya ekonominya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dari kerangka institusi ekonomi ini dapat diketahui cara pengambilan keputusan di negara ini tentang apa lebih baik diproduksi, misalnya apakah lebih banyak beras atau pesawat terbang, apakah mesin tenun atau kedelai.

Terkait dengan pengaturan tentang apa yang akan diproduksi adalah berapa besar peran dunia usaha swasta dan berapa besar peran duniua usaha negara dalam dalam spectrum sistem ekonomi yang digambarkan pada Diagram I, maka semakin besar bobot pengambilan keputusan ini dibuat oleh mekanisme pasar/harga maka sistem ekonominya lebih cenderung menjadi sistem ekonomi liberal/kapitalis. Sebaliknya, semakin cenderung keputusannya dibuat oleh lembaga pemerintah maka sistem ekonominya lebih merupakan sistem ekonomi yang didominasi intervensi pemerintah. Sebagai hasil kemufakatan suatu masyarakat/negara, maka kerangka institusi ekonomi yang berlaku biasanya tidak bersifat statis. Kemufakatan yang tercapai suatu saat biasanya didasarkan atas perkembangan aspirasi dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat pada saat itu. Karena isu-isu dan masalah yang dihadapi terus berkembang maka nilai dan aspirasi dari masyarakat itu akan cenderung ikut berubah.

Dengan berubahnya aspirasi dan sistem nilai ini maka suatu sistem ekonomi yang berlaku akan cenderung ikut berubah dan

berevolusi. Suatu ilustrasi dari perkembangan ini adalah GBHN yang telah diberlakukan setiap lima tahun di Indonesia sejak tahun 1973 dan terakhir pada tahun 1998. Pengamatan atas perkembangan GBHN dari suatu periode lima tahun ke lima tahun berikutnya menunjukkan adanya kecenderungan berubah, yaitu tidak statis. Suatu contoh saja adalah konsep Trilogi Pembangunan yang baru muncul pada GBHN tahun 1978 ketika meningkat aspirasi akan perlunya peningkatan pemerataan dalam pembangunan. Pada periode selanjutnya, dengan mulai munculnya masalah-masalah dan tantangan baru pada saat itu, terutama terkaik dengan jatuhnya harga minyak dunia dari puncaknya sebesar USD 33/barrel pada tahun 1982 menjadi USD 10/barrel pada pertengahan tahun 1986, mulai berkembang nilai-nilai baru yang menginginkan diadakannya berbagai langkah liberalisasi, sebagaimana tercermin pada dikeluarkannya berbagai “paket deregulasi”. Dalam masa tersebut, sistem ekonomi Indonesia, meskipun secara *de jure* tetap dinamakan “Sistem Demokrasi Ekonomi” dan juga dinamakan “Sistem Ekonomi Pancasila”, secara *de facto* telah bergerak kekanan dalam spektrum sistem ekonomi yang digambarkan pada *Diagram I* di atas. (Sebagai catatan kaki dapat ditambah bahwa perubahan yang terjadi pada sistem ekonomi tersebut tidak serta merta diikuti oleh laju perubahan yang sama pada sistem politik).

Suatu hal yang juga perlu dicatat adalah walaupun dapat terbentuk berbagai sistem ekonomi yang berbeda, setiap dan



semua sistem ekonomi tersebut tidak dapat menghindarkan diri dari berbagai kaidah yang berlaku di ilmu ekonomi. Satu kaidah ekonomi mikro adalah hukum permintaan dan penawaran, dalam mana harga suatu barang atau jasa tidak dapat tetap rendah jikalau permintaan meningkat sedangkan penawarannya tidak ikut meningkat. Dalam sistem ekonomi yang diatur pemerintah, harga ini dapat tetap rendah tetapi harus disertai dengan adanya subsidi. Suatu kaidah ekonomi pada tataran makro adalah bahwa kebijakan fiskal pemerintah jikalau tidak dapat berimbang harus ditutupi oleh pinjaman luar negeri kecuali ditingkatkan pajak atau/dan ditingkatkan jumlah uang beredar dari segi kebijakan moneter. Kedua contoh berlakunya hukum ekonomi ini dan implikasinya (dalam contoh: perlunya subsidi dan perlunya pinjaman luar negeri atau/dan inflasi yang lebih tinggi) menunjukkan bahwa masalah pembangunan ekonomi yang semakin banyak dapat terselesaikan pada tataran sistem ekonomi, melalui berlakunya berbagai kaidah ekonomi, akan semakin mengurangi permasalahan yang harus diselesaikan pada tataran sistem politik.

Terdapat keterkaitan antara pembangunan sistem ekonomi dan sistem politik. Umumnya, semakin maju ekonomi suatu negara maka akan semakin liberal sistem ekonominya. Bersamaan dengan perkembangan di sistem ekonomi maka perlu adanya reformasi politik sehingga arah kekanan panah evolusi sistem ekonomi hendaknya disertai oleh arah ke kanan pada panah evolusi sistem politik. Suatu ilustrasi lain tentang harus terkaitnya pembangunan

ekonomi dan pembangunan di bidang politik dan lain-lain bidang non-ekonomi dapat dikutip teori Rostow dalam bukunya “*Stages of Economic Growth*” (Rostow, 1966).

Rostow menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara akan terhambat apabila pertumbuhan itu tidak ditopang oleh nilai-nilai sosial-budaya yang rasional. Menurutnya, tanpa adanya nilai rasionalitas ini, sebagaimana terdapat pada masyarakat “tahap tradisional”, maka akan terhambat perkembangan teknologi yang akan menghambat peningkatan *production function* dan selanjutnya membatasi kemungkinan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, dalam “tahap pra-kondisi untuk tinggal landas” Rostow mengatakan bahwa hambatan pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat akan mulai dilepas dengan mulai terbentuknya *nation-states* dari sebelumnya berbentuk negara-negara bagian yang terfragmentasi. Dalam hal ini, sekali lagi ditunjukkan kaitan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan politik suatu masyarakat. Rostow juga menunjukkan pentingnya kaitan pembangunan di bidang ekonomi dan pembangunan di bidang non-ekonomi ketika menjelaskan syarat-syarat suatu negara dapat “tinggal landas” dalam arti mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Menurut Rostow, selain dibutuhkan rasio investasi terhadap PDB yang meningkat dari 5% menjadi 10% dan tumbuhnya beberapa industri unggulan, suatu negara akan dapat tinggal landas apabila telah

terbentuk suatu sistem politik-sosial-budaya yang akan memungkinkan terus berlanjutnya proses pertumbuhan ekonomi.

### **II.3. Peran Negara dalam Kemajuan Sistem Ekonomi**

Setiap negara yang berdaulat dalam upayanya untuk mensejahterakan rakyatnya harus mempunyai suatu identitas kebangsaan. Upaya peningkatan kesejahteraan umumnya dilakukan melalui upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi sedangkan upaya untuk menjamin terpeliharanya identitas bangsa umumnya dilakukan melalui proses pembangunan. Dalam hubungan ini, pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kegiatan ekonomi dalam suatu sistem ekonomi tertentu, sedangkan pembangunan merupakan upaya pengembangan sistem ekonomi itu sendiri. Tanpa adanya kesepakatan tentang sistem ekonomi yang dianut maka akan lebih terbuka kemungkinan terjadinya perselisihan pendapat mengenai kebijakan ekonomi yang patut ditempuh dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi mendasar yang dihadapi suatu bangsa. Walaupun dalam proses pembentukan *public policy* selalu terdapat suatu *public debate*, namun jika telah ada kesepakatan tentang suatu sistem ekonomi maka akan diredam terjadinya perselisihan pendapat dari suatu ekstrim keekstrim lain yang selain dapat memperlamban proses pengambilan keputusan juga akan menciptakan iklim ketidakpastian bagi dunia usaha dan akhirnya mengganggu stabilitas ekonomi dan politik.

Dalam pada itu, pengembangan sistem ekonomi suatu negara, sebagai bagian dari pengembangan identitas kebangsaannya, tidak terlepas dari upaya untuk mengembangkan berbagai sistem di bidang non-ekonomi, seperti sistem politiknya, sistem hukumnya, dan sistem sosial budayanya. Walaupun akan berkembang dengan laju yang tidak sama, pengembangan setiap sistem ini umumnya akan berjalan dalam satu arah, di mana sistem yang satu akan mempengaruhi sistem lainnya. Umumnya, semakin maju perekonomian suatu negara maka akan berevolusi sistem ekonominya dari etatisme menuju ke liberalisme dan bersamaan dengan ini sistem politiknya akan cenderung bergerak dari sistem yang otoriter menjadi yang lebih demokratis. Suatu ilustrasi proses pengembangan sistem ekonomi dan sistem politik diberikan pada Diagram I di bawah ini.

#### **II.4. Konsepsi Sistem Ekonomi Islam**

Ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern baru muncul pada tahun 1970-an, namun sesungguhnya awal pemikiran Islam telah muncul sejak Islam itu diwahyukan melalui Nabi Muhammad SAW<sup>17</sup>. Dalam catatan sejarah Islam, Nabi Muhammad mengawali praktik pembangunan ekonomi di kota Madinah mulai meletakkan dasar-dasar ekonomi yang mengacu pada nilai-nilai Islam terutama aqidah dan prinsip

---

<sup>17</sup> (P3EI, 2008)



Tauhid. Hal ini dapat dilihat saat Rosulullah membangun ekonomi Madinah, beliau berusaha menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan agar terjadi redistribusi asset ekonomi diantara warga secara merata proporsional. Seperti diketahui dalam sejarah<sup>18</sup> bahwa setelah hijrah kaum Muhajirin yang merupakan salah satu pilar komunitas pembangun masyarakat Madinah secara ekonomi sangat marjinal. Hal ini bisa dipahami karena kaum Muhajirin telah meninggalkan seluruh harta benda dan aset-aset ekonomi lainnya di kota Mekah. Maka pada saat itu persoalan pertama dalam ekonomi yang dihadapi Rosulullah adalah ketimpangan ekonomi social antara kaum Muhajirin (pendatang) dengan penduduk kota Madinah.

Dirunut dalam proses kesejarahan konsep ekonomi pertama yang akan ditegakkan Rosullullah pada saat membangun kota Madinah adalah redistribusi kekayaan, sehingga tidak terjadi ketimpangan ekonomi diantara elemen masyarakat penyangga kota Madinah. Strategi tersebut dilakukan Rosulullah dengan mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshor. Piagam Madinah sebagai tonggak *civil society* dalam sejarah Islam sesungguhnya merupakan kebijakan yang dalam perspektif ekonomi agar redistribusi roda perekonomian di kota Madinah berjalan”...jangan sampai kekayaan hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja diantara kamu” (QS 59:7). Seperti di ketahui

---

<sup>18</sup> <http://jurnal.unimus.ac.id>

bahwa selain kaum Muhajirin dan kaum Anshor di Medinah juga berrmukim masyarakat dari suku bangsa lain semisal kaum Yahudi. Rosullullah mendorong agar semua komponen masyarakat melakukan kerjasama ekonomi sehingga roda perekonomian terus berputar. Konsep perdagangan dengan Sistim Mudharobah (*profit and loss sharing*) sudah diperkenalkan Rasullullah pada masa ini. Kelak kemudian hari para pemikir ekonomi Islam modern melandaskan pemikirannya pada Sistim Mudharobah sebagai antitesa dari sistim ekonomi konvensional. Pengaruh pribadi Rosulullah sebagai seorang saudagar tentunya turut andil dalam mempengaruhi gaya beliau dalam mengkonsep sebuah sistim ekonomi yang adil di kota Madinah. Maka dapat dikatakan bahwa sesungguhnya Islam dan ekonomi sudah merupakan bagian yang tak terpisahkan sejak awal lahirnya Islam.

Persoalan redistribusi kekayaan yang menjadi persoalan ekonomi pada awal Rosulullah membangun kota Madinah sesungguhnya juga merupakan sebuah persoalan krusial dan mendasar yang dihadapi oleh semua paham ekonomi lainnya seperti sosialisme dan kapitalisme. Nilai keadilan dan kesetaraan dalam konsep perekonomian yang dijalankan Rosulullah tersebut misalnya dalam sistim *profit and loss sharing* atau *mudarobah* tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai Tauhid yang sedang di perjuangkan kaum muslimin pada masa itu. Seperti diketahui bahwa pada dasarnya, ilmu sosial termasuk didalamnya selalu

diawali dan didasari pada nilai-nilai tertentu, baik aspek ontologism, epistimologis maupun aksiologis.

Dengan demikian tidak ada ilmu ekonomi yang bebas nilai. Sehingga perlu kiranya mengetahui bahwa dalam ilmu ekonomi Islam dikenal dengan istilah ilmu ekonomi normatif. Tidak semua hal dalam ekonomi berlaku positif yang menganggap semua fakta ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat independen terhadap norma atau nilai-nilai tertentu. Sebagai contoh, hukum penawaran (*supply and demand*) yang menyatakan bahwa jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat, *ceteris paribus*, merupakan pernyataan positif. Hukum tersebut berlaku karena para produsen memandang bahwa kenaikan harga barang adalah kenaikan pendapatan mereka dan motivasi produsen adalah untuk mencetak keuntungan pendapatan sebanyak-banyaknya. Pernyataan positif ini tidak menjelaskan faktor apakah yang mendorong dan mengharuskan produsen untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya atau keuntungan maksimum, wilayah pertanyaan ini sebenarnya wilayah ekonomi normatif. Wilayah yang bersifat normatif dianggap merupakan sebagai sesuatu yang telah ada sebelumnya (*given*) dan berada diluar batas analisis ekonomi.

Secara faktual sesuatu yang *given* itu dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya, agama atau kandungan nilai-nilai lokal lainnya. Pemahaman yang sudah *given* ini implementasinya akan membawa corak tersendiri dalam praktek ekonomi baik secara

langsung atau tidak langsung. Hal ini secara empiris pernah diuji. Menurut Weber, ada pertalian erat antara (ajaran-ajaran) agama dan etika kerja, atau antara penerapan ajaran agama dengan pembangunan ekonomi.

#### **II.4.a. Ekonomi Islam sebagai Doktrin Ekonomi**

Memudahkan untuk memahami tentang sistem ekonomi dalam Islam, Muhammad Baqir Ash Shadr<sup>19</sup> melakukannya dengan cara membedakan antara doktrin ekonomi dan ilmu ekonomi, kemudian merumuskan doktrin ekonomi Islam. *Doktrin ekonomi adalah suatu sistem atau cara untuk mengejar kehidupan ekonomi juga sebagai sekumpulan nilai dan atau teori yang menjadi landasan untuk suatu penafsiran dalam rangka menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi. Sedangkan ilmu ekonomi adalah ilmu yang berhubungan dengan penjelasan terperinci perihal kehidupan ekonomi, peristiwa-peristiwanya, gejala-gejala (fenomena-fenomena) lahiriahnya, serta hubungan antara peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena tersebut dengan sebab-sebab dan faktor-faktor umum yang mempengaruhinya.*

---

<sup>19</sup> Muhammad Baqir Ash Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam, Zahra Publishing, 2008, hal. 79



Dapat dikatakan bahwa doktrin adalah suatu sistem sedangkan ilmu adalah suatu penafisran atau interpretasi. Penggunaan doktrin ekonomi dan ilmu ekonomi tidak dapat serta merta dibedakan. Keduanya dapat digunakan secara bersama-sama, contohnya ketika membahas tentang distribusi kekayaan dan permasalahan produksi. Dalam hal ini permasalahan produksi akan melibatkan hukum-hukum ilmiah mengenai produksi, perkembangan produksi, penemuan sarana-sarana produksi dan perbaikannya yang merupakan perkara ilmu ekonomi, dengan demikian hukum-hukum produksi tersebut tidak akan berbeda penerapannya di negara manapun, meskipun berbeda prinsip-prinsip dan konsep-konsep sosialnya, karena hukum-hukum ilmiah tersebut adalah bagian dari ilmu ekonomi. Bagian yang termasuk dalam investigasi doktrinal adalah yang terkait dengan pengaturan kepemilikan maupun penggunaan kepemilikan, atau dengan kata lain yang menjadi pandangan hidup penganut suatu doktrin tertentu, baik kapitalis, komunis, ataupun islam.

Doktrin ekonomi dan ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan berdasarkan materi dan ruang lingkupnya, doktrin ekonomi akan tetap sebagai doktrin ekonomi dan ilmu ekonomi akan tetap sebagai ilmu ekonomi meskipun bicara mengenai hal yang sama, jika tetap pada tujuan dan metodenya masing-masing. Meskipun doktrin ekonomi dan ilmu ekonomi dapat digunakan pada saat yang bersamaan, tetapi perbedaannya tidak dapat diabaikan, karena mencampurkan keduanya dapat mengaburkan

keberadaan sistem ekonomi dalam Islam. Dalam rangka menegaskan pembedaan ini Muhammad Baqir Ash Shadr<sup>20</sup> menjelaskan sebagai berikut; *Doktrin ekonomi berisikan setiap aturan dasar dalam kehidupan ekonomi yang berhubungan dengan ideologi (keadilan sosial), sementara ilmu ekonomi berisikan setiap teori yang menjelaskan realitas kehidupan ekonomi, terpisah dari ideologi awal atau cita-cita keadilan. Jadi ideologi keadilanlah yang membedakan antara doktrin dan ilmu pengetahuan, dan menjadi pemisah antara gagasan-gagasan doktrinal dan teori-teori ilmiah.*

Suatu gagasan ilmiah yang disandingkan dengan keadilan maka dengan serta merta dapat diberikan label sebagai doktrin yang berbeda dari pemikiran ilmiah. Namun, meskipun dipisahkan secara tegas antara penelitian doktrinal dan penelitian ilmiah, tetapi penelitian doktrinal dapat menggunakan kerangka penelitian ilmiah pula, contoh; hukum suplai dan permintaan, hukum ini secara ilmiah berlaku dan menegaskan, baik pada ilmu pengetahuan maupun pada doktrin tertentu, dalam hal ini hukum suplai dan permintaan adalah hukum ilmiah dalam kerangka doktrin kapitalisme.

Setelah jelas perbedaan antara doktrin ekonomi dan ilmu pengetahuan ekonomi, maka sistem ekonomi dalam Islam adalah aturan-aturan dasar yang memastikan adanya kebebasan dalam

---

<sup>20</sup> Locid.

pasar, melindungi, menjaga, serta mengawasi kebebasan pasar dan memberikan batas-batas terhadap kebebasan tersebut agar selaras dengan konsep keadilan. Islam sebagai suatu sistem ekonomi juga memberikan aturan dasar tentang keuntungan dan bunga dalam kaitannya dengan investasi dan kekayaan serta perdagangan agar selaras dengan konsep keadilan Islam. Dengan demikian, tugas fungsional doktrin ekonomi adalah memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan ekonomi yang berhubungan dengan konsepsi-konsepsi ideologinya dan cita-cita keadilannya, oleh karena itu ekonomi Islam adalah aturan-aturan dasar kehidupan ekonomi yang selaras dengan konsepsi keadilan Islam.

Dalam hal bahwa ekonomi Islam sebagai suatu doktrin ekonomi merupakan aturan-aturan dasar yang mengatur kehidupan ekonomi agar selaras atau sejalan dengan cita-cita dan konsepsi keadilan dalam Islam, maka diperlukan pula untuk memahami perbedaan antara hukum perdata dan doktrin ekonomi.

#### **II.4.b. Hubungan antara Doktrin Ekonomi dan Hukum Perdata sebagai Kerangka Pemahaman terhadap Ekonomi Islam**

hukum-hukum perdata yang berlaku pada suatu negara merupakan penerjemahan dari teori-teori doktrin ekonomi ke dalam perincian-perincian undang-undang legislatif pada tataran hukum. Doktrin ekonomi sebagai suatu sistem yang berisi aturan-aturan dasar membentuk fondasi bagi struktur hukum perdata.

Pada struktur hukum perdata, doktrin ekonomi berada pada lapisan awalnya dan lapisan berikutnya adalah hukum perdata yang terbentuk sesuai dengan sistem atau doktrin ekonominya. Bangunan hukum perdata terbentuk sesuai teori-teori dan berbagai konsepsi yang terkandung dalam sistem ekonomi.

Aturan hukum perdata merupakan pemberi warna sistem atau doktrin ekonomi, sehingga hukum perdata negara yang satu dapat berbeda dengan negara lainnya, meskipun sama-sama menggunakan doktrin ekonomi kapitalisme. Pemerhati ekonomi islam tidak dapat hanya mengkaji hukum perdata suatu negara beserta segala sesuatu yang terkait dengan aturan dan regulasinya, tanpa mengetengahkan doktrin ekonomi yang melandasi prinsip-prinsip hukum perdata tersebut. Dalam Muhammad Baqir Ash Shadr<sup>21</sup> disebutkan bahwa dengan mengkaji hukum perdata suatu negara dapat dengan mudah mengetahui suatu negara menganut kapitalisme atau sosialisme.

Aturan hukum perdata sebagai lapisan luar dari doktrin ekonomi, dapat digunakan untuk menemukan gagasan-gagasan terkait urusan ekonomi yang terkandung dalam doktrin ekonomi tersebut. Namun, berbeda dengan ekonomi kapitalis, doktrinnya dapat diuraikan secara langsung dari gagasan atau ide-ide kapitalisme, dan aturan hukum perdata membantu memperjelas maksud dari gagasan atau ide tersebut. Sedangkan, untuk

---

<sup>21</sup> Ibid. Hal.88

menemukan gagasan atau ide dalam doktrin ekonomi Islam yang harus dilakukan adalah menjadikan aturan-aturan hukum perdata sebagai pengarah untuk menemukan ide atau gagasan sistem ekonomi dalam Islam, atau dengan meniti pancaran dari jejak-jejak hadist.

## **II.5. Hubungan antara Sistem Keuangan dan Doktrin Ekonomi sebagai Kerangka Pemahaman terhadap Ekonomi Islam**

Seperti halnya hukum perdata merupakan suprastruktur dari doktrin ekonomi, demikian pula sistem keuangan merupakan suprastruktur dari doktrin ekonomi, hubungannya dapat dilihat melalui gagasan tentang domain sistemnya<sup>22</sup>. Domain dalam sistem keuangan adalah sumber pendapatan negara dan fungsi pendapatan negara. Sumber pendapatan negara dapat bersumber dari tanah, hutan, dan tambang yang dikuasai oleh negara. Selain perihal sumber pendapatan negara, sistem keuangan juga meliputi perihal fungsi pendapatan negara. Mengenai fungsi pendapatan negara ini yang kemudian akan menjadi ladsan hukum sipil dan hukum perdata sebagai suprastruktur atau lapisan atas sistem ekonomi, akan dipengaruhi dan dijiwai oleh doktrin ekonomi yang merupakan lapisan bawah dari sistem ekonomi<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishaduna)*, Zahra Publishing House, Jakarta, 2008. hal. 98

<sup>23</sup> Ibid.hal.99

Dengan demikian untuk melihat perbedaan doktrin ekonomi seperti Islam, Kapitalis, dan atau Sosialis dapat ditelusuri melalui sistem keuangannya, yaitu menentukan sumbu-sumber pendapatan negara dan kebijakan pengeluarannya, hubungan personal dan finansial, transaksi keuangan antar individu, hubungan finansial antar bangsa dan antar negara. Berdasarkan hukum-hukum keuangan dapat disintesis mengenai prinsip-prinsip dasar yang melandasi sistem ekonomi, atau dapat diketahui doktrin ekonominya.

## **II.6. Penggunaan Teori Kritis untuk Memahami Kemapanan Ekonomi Kapitalis**

Teori kritis bersumber dari pemikiran dialektis kritis Herbert Marcuse, seorang yang diberi label pemikir kiri karena mengusung pembenaran terhadap teori Marxisme dan sangat dipengaruhi oleh filsafat Hegel. Teori Kritis mengandung semangat agar setiap individu mempunyai sikap merelativisir sistem berfikir dogmatis, dengan kata lain oleh teori ini individu diarahkan untuk mencermati nilai, memahami kondisi situasi tertentu dimana seseorang hidup. Situasi yang dimaksud adalah semesta relasi sosial yang berlangsung, struktur kekuasaan dalam masyarakat, sistem nilai dan pranata sosial yang berlaku, tata kelola dan pembagian sumber daya alam, individu dituntut untuk

senantiasa mengkaji dan mencermati mengenai hal-hal tersebut agar terhindar dari perbudakan dan pemerasan.

Teori kritis berangkat dari kesadaran ilmiah dan permenungan filosofi terhadap kenyataan objektif bahwa masyarakat berada dibawah dominasi langsung paham atau dogma kapitalisme. Dengan demikian, sasaran utama dari Teori Kritis adalah masyarakat industri maju kapitalis atau sistem dan negara kapitalis, dominasi berupaya memahami dan mengamati serta mencermati secara mendalam situasi dan aneka gejala sosial, struktur kekuasaan dan institusi masyarakat kapitalis supaya dapat mengerti bagaimana sistem dan semua aparatur bekerja mengarahkan langkah sebagian besar masyarakat di dunia.

Atas dasar sasaran utama Teori Kritis tersebut adalah tepat kiranya jika Teori Kritis digunakan untuk menyusuri kemapanan dan dominasi paham kapitalisme, terutama mengenai sistem ekonomi. Dalam hal ini, tidak secara mutlak teori kritis diyakini sebagai teori yang seharusnya menjadi pedoman, karena hasil akhir dari teori kritis adalah pengangkatan individu pada tataran ilahi, yaitu manusia adalah subjek, pengambil keputusan, dan hakim tunggal bagi setiap perbuatan yang dilakukannya, tiada seorang pun boleh memasuki domain privat individu lain. Dalam hal ini, individu adalah tuhan bagi keinginan, kehendak, dan pilihan hidupnya, dan nalar adalah syarat fundamen untuk pengilahan manusia ini. Sedangkan Islam adalah agama yang pemeluknya disyariatkan untuk menjadi rahmatann lil alamin, dan



Islam mengajarkan bahwa manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan. Namun, yang akan digunakan adalah metode mengkritisi kemapanan kapitalisme.

Berikut adalah pemaparan teori kritis Herbert Marcuse tentang mengapa kapitalisme mampu melembaga dan mendominasi seluruh dunia. Teori kritis Marcuse ini dimulai dari elaborasi gagasan dari Herbert Marcuse dan Karl Marx. Marcuse mempunyai pandangan yang sama dengan Marx tentang prinsip Kapitalisme yaitu; pembagian kerja, pembagian masyarakat kedalam kelas-kelas sosial, alienasi pekerja, dehumanisasi dan komersialisasi manusia melalui kerja yang dikenal dengan teori nilai kerja, efek negative dari Kapitalisme ini memunculkan gagasan Marx untuk menghapus kerja. Gagasan inilah yang dikritik Marcuse, bahwa kerja adalah keniscayaan, kemakmuran, kekuatan materil, kehidupan yang mapan, adil, dan mapan juga adalah keniscayaan, menjadi tujuan semua manusia.

Menggunakan logika berfikir Sigmund Freud yaitu *Psikoanalisis*, Herbert Marcuse menunjukkan relasi dialektis *Eros* (insting kehidupan) dengan peradaban yang menyebabkan takluknya kebebasan individu atau manusia terhadap kepentingan sistem, yang selanjut melahirkan peradaban yang melanggengkan kapitalisme. Rangkaian pemikiran ini berkesesuaian dengan kepentingan penelitian ini, yaitu sarana untuk melihat segala sesuatu dibalik pelembagaan dan kemapanan sistem ekonomi Kapitalisme, kemudian mencoba melihat apakah Ekonomi Syariah

atau Ekonomi Islam yang sedang mengalami perkembangan, berkembang diatas nilainya sendiri, atau hanya sekadar alat bagi Sistem Ekonomi Kapitalisme.

## **II.8. Relasi Pendekatan Psikoanalisa dan Kemapanan Kapitalisme**

Psikoanalisa Sigmund Freud merupakan an teori yang menjelaskan tentang perkembangan manusia. Menurut Sigmund Freud konseps manusia terdiri dari dua bagian yaitu kesadaran dan ketidaksadaran, insting badani dan akal budi, pengaruh dari dalam dan pengaruh dari luar, eros dan logos, individu dan peradaban (kelompok, masyarakat, institusi sosialkeagamaan, dan negara). Dimensi ketidksadaran dijiwai dan diatur oleh prinsip kesenangan dan beorientasi pada kepuasan dan kenikmatan, dimensi ini terdiri dari dorongan instingtual kebinatangan, hasrat seksual, keinginan makan dan minum, bergerak, istirahat, dan sebagainya. Sedangkan dimensi kesadaran dikendalikan oleh daya kerja dan segenap kepentingan nalar yang menjelma dalam prinsip realitas dan bertujuan pada pelestarian diri<sup>24</sup>. Pertarungan antara dimensi kesadaran dan ketidaksadaran terjadi sejak awal pertumbuhan individu. Bayi misalnya, akan berusaha menggenggam kemudian memasukkan benda apapunkemulutnya, karena yang ada pada bayi pada waktu itu adalah dorongan instingtual. Dorongan instingtual

---

<sup>24</sup> Valentinus Saeng, CP. Hal. 149

tersebut berciri agresif, egois, intoleran, momental, dan tanpa kompromi terhadap yang lain. Seiring pertumbuhan akal budi dan kesadaran, individu mulai mengerti bahwa tidak semua hal dapat diraih, tidak semua hal dapat dipegang atau dimakan. Kesadaran tersebut adalah kesadaran terhadap keterbatasan dan pembatasan diri, individu dipaksa dan terpaksa memahami kondisi dirinya karena ada realitas.

Nalar dan pengetahuan yang dimiliki individu merupakan faktor yang membentuk kesadaran individu terhadap keterbatasan dan pembatasan dirinya, atau memahami realitas. Dimensi inilah yang disebut logos, sehingga eksistensi manusia terjadi sebagai pertentangan antara *eros* dan logos. Tetapi pada perkembangan kehidupan manusia logos menguasai dan mendominasi karena adanya prinsip realitas yaitu pertimbangan kegunaan dan keamanan yang timbul dari kemampuan berfikir manusia. Selanjutnya menurut Freud perkembangan dan eksistensi individu sebagai proses konfliktual antara *eros* dan *logos* yang terus berlanjut, dan karena realitas yang dihadapi setiap individu akan senantiasa terkait dengan individu lainnya, maka pertentangan antara *eros* dan *logos* pun terjadi dalam lingkup ras atau kelompok, dan proses konfliktual antara *eros* dan *logos* dalam sejarah individu dan sejarah ras merupakan skema gerak melingkar yang memunculkan peradaban manusia. Peradaban merupakan hasil rasionalisasi terhadap insting yang dianggap merusak dan mengganggu dan juga sebagai pemberdayaan insting yang

mendukung kehidupan. Berangkat dari refleksi Freud terhadap relasi antara *eros*, individu, dan peradaban manusia, Herbert Marcuse memformulasikan suatu logika pemikiran tentang peradaban manusia, bahwa peradaban sejati hanya dapat terjadi jika segala sesuatu yang dihasilkan, dimiliki, dan dinikmati telah bersih dari noda perbudakan, penindasan dan ketakutan. Peradaban sejati adalah syarat mutlak bagi perwujudan diri, pemenuhan aneka kebutuhan secara bebas, damai, tenang, dan senang. Hubungan manusia didasarkan pada sikap hormat, pengakuan timbal balik atas hak dan kewajiban, kehormatan dan martabat pribadi. Relasi manusia dengan alam dirubah dari penguasaan dan pengurusan menjadi persahabatan<sup>25</sup>.

Pelampauan pemikiran Marcuse dari konsepsi Freud tentang peradaban dimulai dari, pembedaan definisi *eros*, jika Freud mendefinisikan *eros* sebagai insting seksual atau dorongan seksualitas yang merupakan prinsip utama dan jiwa dasar dari seluruh dorongan instingtual. Sedangkan menurut Marcuse *eros* adalah prinsip kehidupan dan menggambarkan hasrat dan keinginan untuk mempertahankan hidup secara bebas dan baik, dorongan seksual adalah insting yang menjadi bagian dari prinsip kehidupan. Selanjutnya peradaban adalah hasil yang ditimbulkan dari konflik *eros* dan nalar. Peradaban dan nalar adalah identik.

Peradaban mengekang kebebasan, menindas, dan menundukkan individu di bawah otoritasnya. Peradaban

---

<sup>25</sup> Ibid. Hal. 168

mengontrol dan mengelola eros demi menjamin kemajuan dan kemapanannya. Peradaban adalah suatu keadaan yang lahir melalui beberapa fase yang melibatkan proses pembebasan insting eros (prinsip kehidupan) terhadap segala sesuatu yang tabu dan dilarang, kemudian insting tersebut diarahkan pada hal-hal yang berguna bagi kehidupan pribadi maupun bersama, peradaban muncul sebagai karya baru manusia yang bebas dari pengekanan dan larangan. Pada proses selanjutnya, peradabanlah yang akan mengarahkan segala insting manusia. Herbert Marcuse<sup>26</sup> meyakini bahwa relasi antara eros (prinsip hidup atau kesenangan) dan logos (realitas) yang menjadi dasar bagi struktur perkembangan mental individu, dan struktur masyarakat dalam teori Psikoanalisa Sigmund Freud adalah suatu proses terbuka bukan tertutup. Oleh karena itu, selanjutnya peradaban dihasilkan sebagai hasil kemenangan dari pertentangan eros dan logos. Dalam aliran filsafat klasik yaitu Aristoteles Logos selalu mengarah kepada ada, bermuatan empiris dan material, dan dalam aliran filsafat klasik lainnya yaitu Epikurus semua yang ada adalah materi, sehingga tujuan hidup adalah mengejar kesenangan dan kenikmatan. Rasionalisme Aristoteles dan hedonisme Epikurus masih terus berlanjut sampai saat ini, yang wujudnya adalah kepada pengakuan dan pemujaan idealisme-rasional Hegel, atau pengakuan terhadap supremasi nalar atas dunia dan manusia.

---

<sup>26</sup> Ibid . hal. 173 - 192

Peradaban adalah suatu proses pemaksaan dari luar oleh sistem dan penguasa, mengenai nilai moral dan etis, hukum, tabu, adat kebiasaan, pola pikir, dan tradisi tertentu kepada individu. Muatan kebudayaan dimasukkan, dibatinkan kedalam kesadaran individu melalui institusi keluarga, sekolah, agama, dan aneka macam kelompok sosial. Pemaksaan inilah yang dimaksud oleh mercuse sebagai penindasan dan pengekangan terhadap eros (prinsip hidup), meskipun Sigmund Freud menyatakan bahwa motif pengekangan adalah karena kekurangan dan kepentingan ekonomi, namun Mercuse meyakini bahwa motif pengekangan, pemaksaan, dan penindasan terhadap eros (prinsip hidup) tersebut sebagai motif ideologis. Maka, kekurangan terjadi dalam suasana kelimpahan materi, keterbukaan, dan pembolean. Sensasi kekurangan dan kebutuhan terus terjadi dalam masyarakat kapitalis maju, realitas ini dapat terlihat pada pusat-pusat perbelanjaan, restoran, hotel, tempat wisata, dan lembaga ekonomi lainnya. Kekurangan didistribusikan, keperluan dan kebutuhan dikesankan, tawaran pemenuhannya melalui bekerja, membeli, atau membeli telah dipaksakan kepada semua. Pemenuhan kebutuhan dan kekurangan diraih dengan kekuasaan rasional, tidak melalui tetesan keringat. Distribusi kekurangan dan kesan kebutuhan ini membutuhkan eksistensi kekuasaan dan status quo.

Pelanggaran status quo tersebut pada mulanya menggunakan kekerasan dan penaklukan wilayah, yaitu pada awal abad 16 sampai akhir abad 18, sistem ekonomi dunia pada masa itu bahkan

lebih kapitalis<sup>27</sup>, selanjutnya strategi pelanggaran status quo dilakukan secara lebih rasional, ramah, dan manusiawi. Penguasa kapitalis secara terus menerus menanamkan, mengarahkan, menciptakan, dan mempromosikan pola tingkah laku, pola hidup, status sosial, norma, adat kebiasaan, dan budaya yang dianggap bernilai tinggi. Individu terus didik, dan dipengaruhi secara sistematis untuk menyerap, melaksanakan, dan memimpikan budaya yang dianggap paling bernilai, kemudian individu digiring untuk memiliki sikap berani berkorban harta benda bahkan nyawa agar dapat dianggap sebagai anak zaman dan berbudaya. Realitas inilah yang ditunjukkan oleh Herbert Marcuse sebagai pengekanan peradaban terhadap eros (prinsip kehidupan) yang bermotif ideologis<sup>28</sup>.

Berangkat dari pendekatan psikoanalisa Sigmund Freud dan dilanjutkan oleh teori kritis Herbert Marcuse yang juga dipengaruhi oleh logika dialektis Karl Marx, *antitesis* dan *sintesis*, secara jelas dapat teruraikan mengenai proses kemapanan ekonomi kapitalis sebagai sebuah sistem ekonomi.

## **II.9. Pendidikan dan Proses Humanisasi**

Pendidikan selalu menjadi jalan keluar bagi suatu keinginan bagi perubahan. Dalam hal ini perubahan dapat terjadi

---

<sup>27</sup> Ian Bremer, *Akhir Pasar Bebas*, Gramedia Pustaka Utama, 2010. Hal.32

<sup>28</sup> Valentinus Saeng, *Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global*, Gramedia, Jakarta, hal. 181.



dengan tiga cara: revolusi, evolusi, dan reformasi<sup>29</sup>, pendidikan adalah metode perubahan dengan cara evolusi, tetapi evolusi adalah pilihan yang paling aman, karena dapat menghindari kekerasan dan pertumpahan darah. Pendidikan selalu menjadi jalan evolusi, melalui pendidikan dapat dilakukan penyadaran, penanaman, indroktinasi, dan pelebagaan nilai-nilai yang dianggap luhur. Seperti halnya kemapanan kapitalisme diraih dengan proses sistematis dan terstruktur melalui penciptaan, pengarahan, dan mempromosikan tingkah laku, adat kebiasaan, norma, cara hidup, kebutuhan, status sosial, dsb. Maka, melalui pendidikan dapat dibuka jejak-jejak penguasaan dan penindasan dibalik kepentingan umum, dan nilai luhur, yang menunjuk kepada nilai ideal-utopis namun diserap dan dilaksanakan secara berbeda.

Kerangka penguasaan dan penindasan dapat dilogikakan sebagai berikut: kepentingan umum dan nilai luhur pada dasarnya mengekspresikan kepentingan individu tetapi dipahami sebagai kepentingan institusi dan kelas sosial dalam masyarakat. Melalui proses inilah kepentingan umum dan nilailuhur yang dianggap sebagai kepentingan institusi dan kelas sosial dalam masyarakat diterima sebagai peradaban masyarakat, dan menjadi kepentingan umum dan nilai-nilai luhur yang diterima sebagai kebenaran.

Pendidikan yang humanis juga merupakan sistem pendidikan yang anti *status quo*, melainkan sistem pendidikan

---

<sup>29</sup> Dr. Phil. Astrid S. Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Penerbit Bina Cipta, 1977. hal. 191

yang memusatkan diri pada pada formasi dan konstruksi kesadaran kritis dan sikap bertanggung jawab. Proses penumpukan nalar harus dihentikan dengan cara membangunnya kembali sehingga sadar, dan tajam. Pendidikan humanis dan kritis adalah pendidikan yang mencerahkan dan menerangi, membebaskan, dan memerdekakan, dan anti penjajahan. Pendidikan memiliki kekuatan mengubah dan meluluhlantakkan , sehingga perubahan dan kemapanan suatu sistem dapat dilakukan melalui pendidikan.

## **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

### **III.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa Konten (Content Analysis), yaitu suatu metodologi yang merumuskan pertanyaan penelitiannya dari alasan dibalik kemunculan suatu teks, maksud dan tujuan suatu teks, sasaran dari teks, dan bagaimana teks-teks tersebut menjembatani antara maksud dan harapan dan dari suatu keadaan, dan secara keseluruhan adalah pertanyaan mengenai apakah teks-teks tersebut membuat peneliti dapat memilih jawaban dari pertanyaan yang terkait dengan konteksnya. Dengan demikian, keterimaan kerangka logika *Content Analysis* ini tidak hanya didasarkan kepada pemerosesan data ilmiah (efisiensi dan penanganannya) tetapi juga oleh referensi konteks dalam hubungannya dengan teks-teks yang dianalisa. Analisa Konten (Content Analysis) menjawab pertanyaan penelitian dengan melakukan analisa terhadap teks.

### **II.2. Desain Penelitian**

Melakukan penelitian dengan *Content Analysis* terdapat tiga entri point yang dapat digunakan untuk melakukan desain penelitian yaitu: Pertama, analisa konten yang di dorong oleh teks yang ada, dan teks tersebut kaya dengan stimulasi yang mendorong

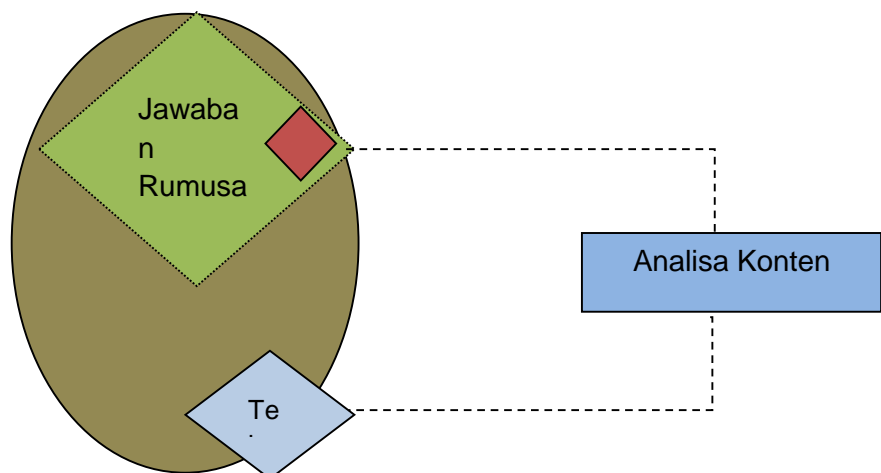
dan memotivasi peneliti untuk memperdalam pengetahuannya tentang suatu teks, dari sinilah kemudian pertanyaan penelitian dikembangkan. Kedua, analisa konten yang di dorong oleh masalah-masalah dalam kehidupan nyata, yaitu fenomena yang tidak dapat diakses secara langsung, kejadian-kejadian, atau suatu proses yang peneliti meyakini bahwa dapat mencari jawaban dari analisa terhadap teks. Analist atau peneliti akan memulai dari pertanyaan penelitian dan memprosesnya untuk menemukan jalur hubungan analitik dari pemilihan teks-teks yang tepat yang dapat menjawab pertanyaan penelitiannya. Ketiga, analisa konten yang didorong oleh motivasi dan hasrat peneliti untuk menerapkan prosedur analisa yang berbeda terhadap hasil penelitian sebelumnya.

Entri point dari penelitian ini adalah yang disebut Kedua yaitu didorong permasalahan yang terjadi pada oleh teks-teks tentang ekonomi Islam dan ekonomi Kapitalis, kemudian berangkat dari teks-teks tersebut ada beberapa prinsip yang digambarkan di dalam teks yang menentukan keberadaan system ekonomi dan politik. Dengan teori ekonomi politiknya yang sudah sangat mapan, kapitalisme juga merupakan system ekonomi yang sudah mapan dan keamanan system ini di pengaruhi pula oleh system politiknya. Saat ini Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam sedang mengalami perkembangan, ketertarikan untuk mengetahui dapat tidaknya Ekonomi Syariah menjadi system ekonomi yang mapan, melatar belakangi dilakukannya penelitian ini, dan

didorong oleh kesadaran bahwa setiap penelitian yang dilakukan harus menghasilkan manfaat nyata bagi perubahan yang lebih baik maka penelitian ini akan juga mengkaji kemungkinan pelebagaan Ekonomi Syariah sebagai system ekonomi melalui institusi Pendidikan Tinggi Islam, yakni isntitusi yang tentunya mempunyai perhatian besar terhadap konsep-konsep Islam. permasalahan yang berangkat dari stimulus yang ditemukan dari teks-teks yang ada tersebut kemudian dikonversikan sebagai pertanyaan-pertanyaan penelitian, dan dalam hal ini telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

### ***Kerangka Logika Analisa Konten (Content Analysis)***

Gambar.1 di bawah ini menampilkan sebuah kerangka konseptualisasi terhadap phenomena dalam penelitian Analisa Konten, yang disebut dengan kerangka logika Analisa Konten yaitu sebagai berikut:



Disini peneliti hanya bergantung kepada ketersediaan teks untuk menjawab rumusan masalah. Peneliti harus memutuskan teks yang akan dipilih. Teks ditempatkan sebagai input dan out put dalam proses analisa terhadap konteks yang telah dipilih. Peneliti akan membuat data dari teks yang telah dipilih, berikut ini adalah lagkah-langkah analisa sebagai sebuah rangkaian dalam pembuatan data, yang disebut dengan komponen yang harus di uji.

### **III.3. Pengujian Komponen**

- a. Unitizing, yaitu proses segmentasi teks dan pengamatan lain yang menarik untuk di teliti
- b. Sampling, proses sampling bergantung kepada rencana sampling. Menarik sample teks yang akan digunakan untuk menganalisa masalah-masalah yang akan dianalisa dengan menggunakan Analisa Konten tidak sama caranya dengan menarik sample individu-individu dari populasi untuk di lakukan survey terhadap mereka. Teks dapat dibaca pada beberapa tingkatan, pada tingkatan kata, kalimat, paragraphs, bab, atau keseluruhan publikasi, sebagai sebuah konsep, isu, plot, genre, dalam kaitannya dengan penarikan sample. Dengan demikian, membuat sample yang representative untuk Analisa Konten adalah jauh lebih rumit. Pada penelitian kualitatif, sample tidak dapat

digambarkan berdasarkan aturan statistic, tetapi kuota dan contoh yang disajikan peneliti kualitatif kepada pembaca mempunyai fungsi yang sama dengan sample. Pembatasan (quoting) contoh-contoh yang khas yang dapat mendukung maksud secara keseluruhan mengesahkan klaim bahwa peneliti menyajikan kasus yang sama atau tidak ada kasus yang terlewat.

- c. Recoding atau Coding, yaitu menjembatani gap antara teks-teks yang telah disegmentasi peneliti dengan segmentasi dari orang lain yang membacanya. Hal yang paling penting dalam komponen-komponen analisa adalah bahwa peneliti perlu untuk membuat record dari keseluruhan fenomena. Setelah fenomena sudah direcord peneliti dapat membandingkan berdasarkan pergantian waktu atau menerapkan metode yang berbeda. Bagaimanapun, teks-teks tertulis pada dasarnya sudah di record, dengan demikian dibutuhkan dalam mentransformasikan teks yang tersaji dalam bentuk yang dapat dianalisa, yang secara keseluruhan dicapai melalui intelegensi peneliti.
- d. Mereduksi data, yaitu melayani kebutuhan peneliti untuk penyajian yang efisien, dalam penelitian qualitative sangat penting untuk mereduksi keluasan data terhadap permasalahannya, yang mempunyai

dampak yang sama dengan reartikulasi dan penyimpulan.

- e. Penyimpulan Cepat, yaitu fenomena kontekstual dari teks yang menggerakkan analisa diluar data. Proses ini menjembatani keterbatasan jumlah deskripsi teks dengan maksud, tujuan, keterkaitan, atau penyebab dari suatu teks. Penyimpulan Cepat tidak sama dengan proses deduksi dan induksi yang meminta jaminan atau pembuktian, dalam Analisa Konten jaminan atau pembuktian disediakan oleh Konstruksi Analisa (Analytical Construct) yaitu ditopang oleh semua hal yang diketahui tentang konteks.
- f. Menarasikan Jawaban, yaitu penjelasan signifikansi praktis dari temuan atau kontribusi yang telah peneliti buat pada literature yang tersedia, atau membuat hasil penelitian comprehensive terhadap yang lain.

Dengan demikian empat komponen pertama di atas adalah proses pembuatan data, dan komponen kelima yaitu penyimpulan Cepat terhadap fenomena kontekstual, adalah ciri khas yang unik dari Analisa Konten dan dapat merepresentasikan atribut data, langkah ini sama dengan observasi yang dilakukan untuk memulai penelitian Ilmu Alam, dalam ilmu social penyimpulan Cepat sama dengan fungsi observasi dalam penelitian ilmu alam atau natural Science, dimana dalam ilmu social penggunaan mekanikal sangat tidak umum dipakai.



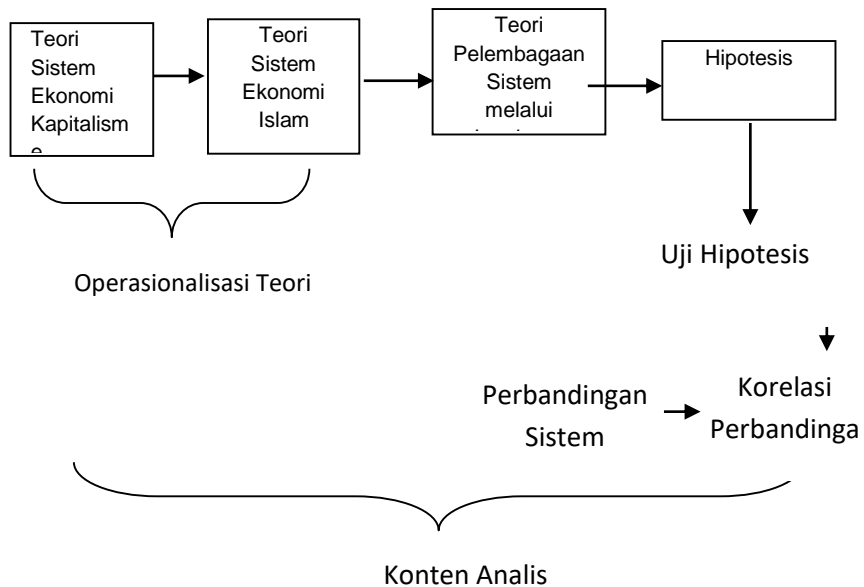
### **III.4. Variabel Penelitian**

Variabel dalam penelitian ini masuk dalam kategori variable nominal dalam jenis penelitian Analisa Konten (Content Analysis), tetapi nominal untuk variable ini hanya terbatas pada namanya saja, dengan demikian variable nominal diatur tanpa ada pembedaan. Pada variabel nominal tidak ada pengaturan atau bentuk hubungan antar nilai dalam variable, dan tidak ada pengukuran data dengan menggunakan logika matematika (metrik), pengaturan dan pengukuran data dalam tiap variabel adalah penetapan teori. Data akan direcord dalam kategori nominal, karena perbedaan antara dua nilai dalam suatu variabel nominal adalah sama dengan pasangan nilai yang lainnya.

### **III.5. Konstruksi Analisa**

Enam komponen dari Analisa Konten yang telah dijelaskan sebelumnya tidak perlu diorganisasikan secara linear. Desain Analisa Konten dapat meliputi kurva atau pengulangan dari suatu proses tertentu sampai suatu kualitas jawaban telah dicapai, proses ini disebut dengan Konstruksi Analisa, yaitu prosedur untuk menggambarkan kesimpulan dari teks. Operasionalisasi Konstruksi Analisa tentang apa yang diketahui peneliti, bukti, atau asumsi tentang suatu konteks terhadap teks sebagai prosedur menggambarkan kesimpulan yang berasal dari teks. Konstruksi

Analisa dalam Analisa Konten dapat digambarkan pada gambar 2 di bawah ini:



### III.6. Skema Konseptual

Melakukan perbandingan terhadap dua variabel dengan menggunakan metode penelitian konten analisis, analisa dilakukan dengan membuat skema konseptual (*Conceptual Scheme*), yaitu dengan membuat standar untuk penoalakan terhadap kategorisasi Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sistem Ekonomi Islam, dan standar penerimaan terhadap kategorisasi Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sistem Ekonomi Islam.

► Standar Penerimaan:

1. Konsep mengenai peran negara dalam ekonomi
2. Konsep mengenai kepemilikan umum dan individu
3. Konsep mengenai sistem pasar
4. Konsep mengenai perdagangan internasional
5. Konsep mengenai distribusi produksi
6. Konsep mengenai lembaga keuangan
7. Konsep mengenai perlindungan hak publik dan individu
8. Konsep mengenai hubungan antara negara dan masyarakat
9. Konsep tentang pencapaian kemakmuran negara
10. Konsep tentang keadilan sosial

► Standar Penolakan:

1. Tidak ada Konsep mengenai peran negara dalam ekonomi
2. Tidak ada Konsep mengenai kepemilikan umum dan individu
3. Tidak ada Konsep mengenai sistem pasar
4. Tidak ada Konsep mengenai perdagangan internasional
5. Tidak ada Konsep mengenai distribusi produksi
6. Tidak ada Konsep mengenai lembaga keuangan

7. Tidak ada Konsep mengenai perlindungan hak publik dan individu
8. Tidak ada Konsep mengenai hubungan antara negara dan masyarakat
9. Tidak ada Konsep tentang pencapaian kemakmuran negara
10. Tidak ada Konsep tentang keadilan sosial

### **III.7. Triangulasi Penelitian**

1. Aturan hukum mengenai peran negara dalam ekonomi
2. Aturan hukum kepemilikan umum dan individu
3. Aturan hukum mengenai sistem pasar
4. Aturan hukum mengenai perdagangan internasional
5. Aturan hukum mengenai distribusi produksi
6. Aturan hukum mengenai lembaga keuangan
7. Aturan hukum mengenai perlindungan hak publik dan individu
8. Aturan hukum mengenai hubungan antara negara dan masyarakat
9. Aturan hukum tentang pencapaian kemakmuran negara
10. Aturan hukum tentang keadilan sosial

## **BAB IV**

### **ANALISA DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Menemukan Doktrin Ekonomi Islam**

##### *4.1.a. Hukum Fundamental Islam dalam Distribusi Kekayaan*

Distribusi kekayaan meliputi dua hal, yaitu, *pertama*, distribusi sumber-sumber produksi yang meliputi tanah, bahan-bahan mentah, alat-alat dan mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi barang komoditi, dan *kedua*, distribusi kekayaan produktif yaitu kekayaan dalam wujud komoditi seperti barang-barang modal, aset tetap, dan barang-barang yang dihasilkan dari proses produksi. Dalam Islam yang dimaksud dengan sumber produksi adalah segala sumber daya alam yang dianugerahkan Tuhan kepada umat manusia sebelum kekayaan tersebut diproses dengan aktivitas ekonomi. Jika dalam ilmu ekonomi konvensional sumber-sumber produksi terdiri dari tiga (3) unsur, yaitu: Alam, modal, kerja. Namun dalam Islam modal tidak dapat dijadikan sebagai sumber produksi karena modal didapat melalui pengolahan sumber produksi yang dijadikan sebagai kekayaan baik sebagai simpanan, atau investasi. Sedangkan, kerja tidak dapat dianggap sebagai sumber produksi karena bersifat abstrak dan immaterial yang tidak dapat masuk keruang lingkup kepemilikan pribadi ataupun kepemilikan publik.

Selanjutnya, kerangka distribusi dalam ekonomi kapitalis adalah mengenai distribusi nilai uang dari barang-barang

produktif, sehingga distribusi mengenai sumber-sumber ekonomi bukanlah hal yang dikedepankan oleh ekonomi kapitalis. Masalah distribusi dalam pendapatan nasional, dan tidak terkait dengan kekayaan nasional secara keseluruhan, karena kebebasan mutlak terhadap kepemilikan individu yang menjadi salah satu prinsip ekonomi kapitalis tidak membenarkan adanya kekuasaan negara untuk mendistribusikan sumber-sumber ekonomi. Oleh karena kerangka distribusi kekayaan ekonomi kapitalis adalah distribusi nilai uang, maka yang menjadi bahasan utama adalah persoalan produksi.

Mengenai distribusi kekayaan Islam mengatur secara luas dan komprehensif, distribusi kekayaan dalam Islam meliputi distribusi sumber-sumber produksi, Islam mengatur distribusi sumber daya alam dan apapun yang dikandungnya, Islam memisahkan kepemilikan sumber-sumber produksi dengan bentuk-bentuk produksi yang berlaku, dan memisahkan distribusi sumber-sumber produksi dengan bentuk-bentuk produksi. Tidak dibenarkan adanya kepemilikan individu yang sebebaskan-bebasnya dalam persoalan distribusi sumber-sumber produksi. Persoalan mendasar dalam distribusi kekayaan, menurut Islam tidak terletak pada sistem distribusi sarana produksi yang membuat produksi tumbuh dan berkembang, sehingga sistem distribusi akan berubah setiap kali mode produksi membutuhkan sistem produksi yang baru, melainkan masalah utama terletak pada unsur manusianya.

Islam mengakui kepentingan, keinginan, hasrat, dan kebutuhan manusia sebagai pribadi yang harus dipenuhi, sehingga terdapat formulasi hukum Islam mengenai kepemilikan pribadi. Sewaktu hubungan antara pribadi terjadi, maka akan terbentuk kebutuhan bersama atau kebutuhan umum masyarakat. Terdapat formulasi hukum Islam mengenai kepemilikan bersama atau kepemilikan umum atas sumber-sumber produksi. Tentu saja diantara individu tidak mempunyai kemampuan yang merata, jika terdapat para individu yang tidak dapat memenuhi berbagai kebutuhannya, akan terjadi ketidakseimbangan sosial jika keadaan semacam itu dibiarkan begitu saja, sebagai jawaban terhadap permasalahan seperti ini Islam memformulasikan hukum kepemilikan negara. Demikianlah, Islam mengatur kepemilikan sumber-sumber produksi yaitu segala kekayaan alam yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia, dan menjadi landasan fundamental bagi hukum distribusi kekayaan.

Selanjutnya yang disebut sebagai sumber produksi adalah sebagai berikut<sup>30</sup>:

1. Tanah

Tanah adalah sumber produksi yang paling penting, Surat Al-Baqarah ayat 36 menyebut tanah sebagai tempat tinggal manusia di bumi, dan sebagai tempat kesenangan. Dalam hal

---

<sup>30</sup> Afzalurrahman, *Mohammad Seorang Pedagang*, Yayasan Swarna Bhumi, 1997. Hal. 226 - 234

ini, kesenangan tersebut mencakup semua kebutuhan manusia yang muncul pada saat ini maupun yang akan datang.

*“.....dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai batas waktu yang ditentukan”*. (2: 36).

Beberapa hadits Nabi menyebutkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras mencari nafkah dan memanfaatkan serta menggali kekayaan yang tersembunyi di dalam tanah.

## 2. Mineral

Al-Qur'an menyebutkan tentang besi sebagai bahan mineral yang ada di bumi sebagai berikut:

*“Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia”* (57:25).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SAW telah menciptakan logam besi untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia.

## 3. Pegunungan

Ayat Al-Qur'an banyak sekali yang menyebutkan tentang kemanfaatan pegunungan bagi manusia. Allah SAW telah menumbuhkan segala sesuatu secara harmonis dan bermanfaat di pegunungan, dalam jumlah yang besar untuk memenuhi



tuntutan-tuntutan yang akan semakin banyak seiring dengan perkembangan manusia dari generasi ke generasi. Mengenai penjelasan ini terdapat dalam Surat al-Hijr ayat 15 sebagai berikut:

*“Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.....Dan Kami telah menjadikan untuk mu di muka bumi keperluan-keperluan hidup”.*

#### 4. Hutan

Hutan adalah sumber produksi yang sangat penting, kandungan hutan adalah kekayaan alam yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia seperti, bahan bakar, bahan-bahan bangunan, bahan mentah untuk kertas, obat-obatan, perkakas rumah tangga, dan masih banyak lagi kebutuhan hidup manusia yang dapat dipenuhi melalui hutan. Mengenai penjelasan ini Al-Qur'an Surat Yasin ayat 80 menyebutkan:

*“....Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu yang hijau itu”.*

Distribusi kekayaan dalam Ekonomi Islam ditandai dengan pembagian kepemilikan kedalam tiga jenis, yaitu kepemilikan

negara, kepemilikan bersama, dan kepemilikan individu. Kepemilikan negara didasarkan pada aspek pengaturan terhadap prioritas penguasaan oleh individu atas Sumber Daya Alam seperti tanah, tambang, dan tanah yang subur, namun prioritas penguasaan tersebut bukan merupakan hak kepemilikan individu. Prioritas penguasaan ini didasarkan pada nilai kerja dalam ekonomi Islam<sup>31</sup>. Sedangkan tanah, tambang, air, rumput, dan SDA alam lainnya secara substansi menjadi kepemilikan publik atau kepemilikan bersama. Individu dapat memiliki hak penguasaan eksklusif, ataupun memiliki sebatas cukup untuk kebutuhannya.

Terdapat hubungan antara hak-hak penguasaan eksklusif atas SDA dan kerja. Individu tidak dapat memiliki hak penguasaan terhadap SDA tanpa ada kerja yang dilakukan. Variabel kerja dalam hal ini berbeda sesuai dengan jenis sumber produksinya, dalam kasus tanah dan bahan tambang misalnya melakukan reklamasi dapat mendatangkan hak penguasaan eksklusif kepada individu, tetapi kerja memungut batu yang ada digurun atau menciduk air disungai dapat mendatangkan hak kepemilikan individu terhadap batu dan air yang dicituk tersebut, lain lagi halnya dengan kerja membuka dan menggarap tanah mati, kerja ini dapat mendatangkan hak penguasaan eksklusif kepada individu, namun jika seseorang menemukan tanah yang subur lalu menggarapnya dengan segenap usaha, kerja tersebut tidak

---

<sup>31</sup> Muhammad Baqir Ash Shadr. Hal. 247 - 283

mendatangkan hak penguasaan dan kepemilikan kepada individu tersebut, hal ini dipengaruhi oleh aspek nilai kerja, yaitu tanah yang subur dapat langsung ditanami tanpa harus dihidupkan terlebih dahulu, sehingga secara substansi tanah yang subur adalah milik publik.

#### *4.1.b. Hukum Kapitalisme dalam Distribusi Kekayaan*

Kapitalisme didefinisikan sebagai penggunaan kekayaan untuk menciptakan kekayaan lebih besar<sup>32</sup>. Sangat berbeda dengan Islam, secara umum faktor-faktor produksi atau alat-alat produksi tidak hanya meliputi sumber daya alam yang diciptakan Allah SWT untuk pemenuhan kebutuhan manusia, melainkan meliputi juga tenaga kerja dan modal. Sistem ekonomi Kapitalisme mempunyai ketentuan bahwa alat-alat produksi yang meliputi lahan (tanah, bahan tambang, hutan, dan SDA lainnya), modal, dan tenaga kerja sebagai faktor-faktor yang dimiliki dan diperdagangkan oleh swasta.

Kenneth Minouge, seorang filsuf politik mendefinisikan kapitalisme sebagai “yang dikerjakan oleh orang banyak ketika kita membiarkan mereka berbuat sekehendak hati”<sup>33</sup>. Individu dan lembaga-lembaga milik swasta membuat sebagian besar keputusan tentang apa yang harus dibeli dan berapa banyak harus dibayar,

---

<sup>32</sup> Ian Bremer, *The End of Free Market*, Gramedia, 2010, hal. 23

<sup>33</sup> Ibid.

tentang apa saja yang harus dibuat dan berapa banyak yang harus dijual, dan berapa banyak yang harus diinvestasikan. Sementara itu negara tidak mempunyai peran apapun kecuali untuk melindungi hak cipta. Menurut Adam Smith, masyarakat yang menggunakan sistem ekonomi kapitalisme mengambil manfaat dari kerakusan individu;

*“Dengan mengarahkan industri itu sedemikian sehingga hasilnya akan mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tujuannya hanya untuk keuntungan dirinya sendiri, dan individu itu dituntun oleh sebuah tangan yang tidak kelihatan untuk menuju kesuatu tempat yang bukan berasal dari kehendaknya”<sup>34</sup>.*

Jika Islam mengedepankan moralitas individu, sehingga suatu sistem ekonomi yang adil bisa terjadi, Adam Smith dalam bukunya *The Theory of Moral Sentiment*;

*“didalam diri individu terbukti terdapat beberapa prinsip dalam sifat dasar manusia yang membuatnya tertarik kepada kekayaan orang lain, dan menyerahkan kebahagiaan yang diperlukan kepadanya, meskipun ia tidak mengambil apapun darinya”<sup>35</sup>.*

---

<sup>34</sup> Adam Smith, *The Wealth of Nation*, Harriman House, 2007, book.4 hal.484

<sup>35</sup> Adam Smith, *The Theory of Moral Sentiments*, Cambridge University Press, 2004, introduction.

Seperti halnya yang diuraikan oleh Herbert Mercuse dengan menggunakan teori psikoanalisa Sigmund Freud, bahwa terdapat dua dimensi dalam diri individu *eros* dan *logos*<sup>36</sup>, baik dan buruk, yang selalu mengalami pertentangan seiring perkembangan diri individu itu sendiri. Maka dimensi yang menjadi landasan tentang pergerakan atau perkembangan ekonomi melalui “Tangan yang tidak Kelihatan” yang didengungkan oleh Adam Smith, adalah dimensi atau insting untuk merebut dan menginginkan kekayaan orang lain, yang insting ini dapat dipenuhi melalui pengarahannya industri yang sebesar-besarnya untuk keuntungan manusia.

Berangkat dari teori-teori awal kapitalisme tersebut, maka hukum dasar atau fundamental dari sistem ekonomi kapitalisme terkait dengan distribusi kekayaan adalah bahwa faktor-faktor produksi atau alat-alat produksi seiring dengan ideologi kebebasan individu, bebas untuk dimiliki oleh setiap individu, dan lembaga-lembaga swasta mengambil tempat ketika dibutuhkan kekuatan modal yang besar untuk kepemilikan alat-alat produksi, dan kompetisi menggunakan kekuatan modal adalah dasar kepemilikan dan distribusi kekayaan

#### **4.2. Perbedaan Prinsipal antara Ekonomi Islam dan Kapitalisme dalam Peraturan Aktivitas Ekonomi**

##### **4.2.1. Konsepsi Kepemilikan Individu dalam Ekonomi Islam**

---

<sup>36</sup> Opcid. Hal. 155

Manusia sebagai individu dalam konsepsi Islam mempunyai dua kekuatan yaitu sebagai individu itu sendiri dan sebagai anggota masyarakat. Individu tetaplah sebagai sentral bagi dirinya, yaitu bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri, yang akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kelak dihadapan Tuhan, bukan orang lain atau masyarakatnya. Inilah dasar nilai-nilai moral dan konseep sosial dalam Islam. Oleh karena itu, tujuan utama sistem sosial dalam Islam adalah kesejahteraan individu, untuk itu kebebasan dan kemerdekaan berusaha, berfikir, dan bekerja adalah hal yang diharuskan dalam Islam, baik kapitslisme maupun sosialisme ekstrim sangat membatasi kebebasan individu, Kapitalis membatasi melalui penindasan dan pengekangan secara tersembunyi, terstruktur, dan sistematis. Sedangkan, Sosialisme ektrim mengekang kebebasan individu dengan kendali negara yang berlebihan.

Sifat kebebasan individu dalam Islam adalah kebebasan untuk melakukan pilihan, karena hak kebebasan berfungsi memahami sifat-sifat yang istimewa dalam suatu pilihan<sup>37</sup>, tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh dua faktor. *Pertama*, individu bebas memperjuangkan ekonominya, selama tidak melanggar atau merugikan hak-hak individu yang lain atau membahayakan kebiasaan yang baik dalam masyarakat. *Kedua*, untuk mempertahankan kehidupan individu harus mengerjakan yang

---

<sup>37</sup> Afzalurrahman, *Mohammad Seorang Pedagang*, Yayasan Swarna Bhumi, 1997. Hal. 75

halal dan meninggalkan yang haram atau memperoleh sesuatu yang tidak pantas. Islam melarang semua cara yang tidak benar, tidak adil, tidak baik, dan tidak wajar. Hal ini dijelaskan dalam ayat al-Qur'an sebagai berikut<sup>38</sup>:

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan” (2: 168).*

Terdapat pula penjelasan dalam Surat Al-A'raf:

*“Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang tidak baik”. (7: 157).*

Hak untuk memiliki kekayaan pribadi diakui sangat jelas dalam Islam. Bahkan Islam mewajibkan umatnya untuk memelihara hartanya baik dari pencurian, penipuan, dan cara-cara pemilikan yang haram, baik yang menggunakan kekerasan maupun ketidakjujuran. Islam mengatur pula dasar hukum bagi pembagian warisan, hal ini menunjukkan diakuinya hak kepemilikan kekayaan pribadi dalam Islam. Pengakuan mengenai kepemilikan pribadi ini dijelaskan dalam Surat al-Zariyat: 19, yaitu:

---

<sup>38</sup> Ibid. Hal 76

*“Dan pada harta-harta mereka, terdapat hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.*

Dijelaskan pula dalam Surat al-Kahfi ayat 32, yaitu

*“Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak muda yatim di kota ini. Dan dibawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah orang yang sleh, maka Tuhanmu menghendaki agar mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu.*

Meskipun hak kepemilikan kekayaan pribadi diakui dalam Islam, tetapi Islam juga mengatur tentang pembatasan kepemilikan kekayaan individu, yaitu dengan cara me wajibkan individu menyerahkan kepada masyarakat kelebihan kekayaannya setelah terpenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Dengan demikian, Islam memberikan hak dan kebebasan kepada individu untuk bekerja keras meraih kekayaan dan memiliki kekayaan, tetapi kebebasan itu dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu sesuai dengan kepemilikan hartanya.

Kewajiban-kewajiban yang membatasi kepemilikan kekayaan individu adalah kewajiban kepadamasyarakat. Konsepsi ini menyiratkan arti bahwa ada hak bersama atau hak masyarakatatas sumber-sumber ekonomi yang telah diciptakan Tuhan bagi seluruh manusia, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kewajiban-kewajiban tersebut juga menyiratkan



larangan untuk berlebih-lebihan, dan menumpuk kekayaan, kebebasan kepemilikan harta dijalankan dalam kerangka keadilan sosial bagi masyarakat. Untuk kepentingan pembatasan kekayaan individu ini, negara dalam Islam mempunyai hak untuk menghimpun sumbangan yang disishkan dari kekayaan individu yang telah mencapai kecukupannya<sup>39</sup>. Beberapa bentuk kewajiban tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Infaq

Infaq adalah bentuk kewajiban bagi individu untuk menyumbangkan kekayaannya untuk menolong fakir miskin atas dasar tolong menolong, tanpa mengharapkan balasan materi, melainkan hanya semata-mata mencari keridlaan Allah SWT. Semangat ini dapat dikembangkan melalui latihan dan pendidikan moral yang tinggi. Jumlah infaq tidak dibatasi, Allah SWT memerintahkan kepada individu yang senantiasa mengharapkan keridhaanNya untuk membelanjakan berapa pun yang tersisa setelah memenuhi kebutuhan pengeluaran mereka sendiri. Infaq adalah jalan untuk keadilan sosial.

2) Zakat Harta (Al-Afw)

Kata Al-Afw berarti kekayaan atau harta yang melebihi kebutuhan, individu diwajibkan menafkahkan beberapa bagian dari kelebihan hartanya setelah terpenuhi semua

---

<sup>39</sup> Opcid. Hal. 97

kebutuhannya, untuk menolong orang-orang miskin. Negara sangat berperan dalam menghimpun kelebihan kekayaan individu, karena tidak semua orang kaya dengan kekayaan berlebih mempunyai moralitas yang tinggi sehingga mereka menyadari tentang kewajiban menyisihkan beberapa bagian dari kekayaannya untuk menolong sesamanya.

Peran negara diwujudkan dengan membuat hukum positif yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Individu dengan kelebihan kekayaan atau anggota masyarakat yang kaya setiap tahun wajib menzakatkan hartanya sebesar 2,5% dari seluruh kekayaannya untuk kepentingan kaum miskin. Lembaga yang mengelola yaitu memungut atau mengumpulkan zakat tersebut dan membagikan zakat tersebut kepada fakir miskin, lembaga ini disebut sebagai amil zakat. Tujuan kewajiban mengeluarkan zakat harta oleh anggota masyarakat yang kaya adalah memperbaiki kemampuan ekonomi anggota masyarakat yang miskin, sehingga pemberian zakat lebih diarahkan kepada pengembangan perdagangan, dan kegiatan bisnis lainnya. Selain itu, zakat juga ditujukan untuk yatim piatu, para janda, orang cacat, atau pun orang sakit, dengan kata lain zakat berfungsi sebagai asuransi sosial.

Terdapat beberapa prinsip utama mengenai zakat yaitu, porsi zakat akan lebih besar ditempat yang banyak kemiskinannya, dan akan lebih sedikit porsinya ditempat yang

lebih sedikit kemiskinannya. Prinsip lainnya adalah: jika pendapatan diperoleh tanpa kerja keras maka tarif zakat akan lebih tinggi dari tarif zakat yang diperoleh dari hasil kerja keras. Pendapatan atau kekayaan yang diperoleh tidak dari hasil kerja keras adalah semakin sedikit jumlah tenaga dan modal yang dilibatkan dalam penumpukan suatu pendapatan, dan sebaliknya pendapatan atau kekayaan yang diperoleh dari hasil kerja keras adalah pendapatan dan kekayaan yang diperoleh dari jumlah modal dan tenaga kerja yang banyak.

Zakat dipungut atas modal bukan investasi, setelah dipotong biaya-biaya lain pada setiap akhir tahun. Seluruh jenis modal dari berbagai macam modal yang dimiliki pemilik modal selama satu tahun penuh akan dikenakan zakat. Dengan demikian zakat hanya dapat dibayarkan setelah pembelian atau kepemilikan modal sudah berumur setahun, zakat dapat ditarik setelah mencapai nisabnya. Keterangan dalam Al-qur'an mengenai kewajiban zakat dapat ditemui dalam berbagai surat diantaranya adalah:

Pada Surat Al-Anbiya' ayat 73:

*“ Dan Kami jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin, yang memberi petunjuk (pada orang-orang) atas perintah Kami, dan telah Kami wahyukan kepada mereka (supaya) berbuat kebajikan, mendirikan shalat dan membayar zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah”(21: 73).*

Pada surat An-Nur ayat 56:

*“Dan laksanakanlah shalat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat”.*

Sedangkan ketentuan Nisab (Batas Pengeluaran zakat) yaitu batas pengeluaran minimum dari tiap-tiap jenis harta adalah, pertama, jika individu mempunyai hutang, akan dihitung keseluruhan hutangnya terlebih dahulu, untuk selanjutnya ditentukan nisabnya. Batas pemotongan (nisab) harus dipersiapkan secara teliti. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ketentuan *nisab*, dan terhadap produktivitas nyata dan potensial tidaknya barang-barang yang akan dikenakan zakat. Seluruh harta yang dapat dikatakan produktif adalah seperti, barang-barang dagangan, tanah pertanian, dan hewan ternak yang dapat membantu dalam produksi, juga emas dan perak. Barang-barang semacam ini dikenakan pungutan diatas batas minimum. Sementara barang-barang yang tidak produktif, yang tidak diperdagangkan untuk mendapat keuntungan tidak dikenai pajak<sup>40</sup>. Mengenai pemotongan pajak ini, terdapat aturan yang lebih rinci.

Tidak semua orang berhak untuk menerima zakat, mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat juga telah diatur dalam Islam, yaitu: Musafir, fisabilillah, orang yang berhutang, pembebasan budak, Muallifat Al Qulub,

---

<sup>40</sup> Opcid. Hal.158

pengumpul zakat, miskin, dan fakir. Inilah delapan kondisi orang yang berhak menerima zakat, dan hak menerima zakat pun tidak serta merta diberikan, kedelapan kondisi orang tersebut dengan ketentuan mereka telah berupaya semaksimal mungkin untuk memperoleh penghidupannya, namun tidak cukup untuk mempertahankan diri dan keluarganya. Dengan demikian, Islam pada satu sisi mendorong individu untuk bekerja keras, dan mendapatkan penghidupannya, namun disisi lain Islam juga memerintahkan negara untuk memberikan pekerjaan kepada warganya, sehingga dengan usaha pribadi dan bantuan negara, setiap individu dapat memperoleh penghidupan, tetapi bagi individu yang setelah itu tetap tidak sanggup mendapatkan nafkah, atau mampu mendapatkan nafkah tetapi tidak mencukupi untuk memelihara keluarganya, maka zakat akan membantu setiap mereka yang ada dalam kondisi sulit. Inilah asuransi sosial atau jaminan sosial yang diatur dalam Islam.

Konsepsi kepemilikan pribadi dalam Islam selain dibatasi oleh prinsip keadilan sosial melalui distribusi kekayaan yang telah pasti ketentuannya dan diatur dalam hukum Islam, juga dibatasi oleh kemanfaatan. Kekayaan atau sumber daya alam atau juga disebut harta yang berkaitan dengan hak seluruh manusia, yaitu kemanfaatannya adalah bagi umum, seperti sungai, jalan, minyak bumi, dan bahan tambang lainnya tidak

dapat dimiliki secara pribadi karena dapat menghilangkan hakikat tujuannya<sup>41</sup>.

Nilai kemanfaatan ini juga berlaku bagi dasar kepemilikan individu dalam Islam. Kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan umum.

#### *b. Konsepsi Kepemilikan Individu dalam Kapitalisme*

Kepemilikan individu dalam kapitalisme didasarkan pada prinsip kebebasan individu, dengan demikian individu berhak memiliki sumber-sumber kekayaan alam tanpa terbatas, hal yang dapat menjadi justifikasi membatasi kepemilikan individu dalam kapitalisme adalah bersinggungan tidaknya kepemilikan tersebut dengan hak orang lain.

### **4.2.2. Konsepsi Komoditi dalam Perdagangan**

#### *a. Konsepsi Komoditi dalam Perdagangan Menurut Islam*

Secara substansi Islam mengatur mengenai komoditi dalam perdagangan yaitu sebagai berikut<sup>42</sup>:

1. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat, maka Islam mewajibkan masyarakat untuk memproduksi komoditi dalam jumlah yang cukup sehingga

---

<sup>41</sup> KKH. Dr. Surahman Hidayat, *Pengantar Studi Syariah*, Robbani Press, 2008, hal.283

<sup>42</sup> Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam*. Hal 450

semua kebutuhan dasar dapat terpenuhi secara memadai, bila batas minimal produksi atau batas kebutuhan pokok belum tercapai, maka potensi-potensi yang ada tidak diperkenankan untuk diarahkan keberbagai bidang produksi lainnya. Dasar dari aturan ini adalah bahwa kebutuhan memainkan peran positif dalam pergerakan produksi, terlepas dari ada tidaknya daya beli yang menyokong kebutuhan tersebut.

2. Namun, Islam pun melarang produksi yang berlebih-lebihan baik dalam skala individu maupun masyarakat, karena surplus produksi termasuk tindakan berlebih-lebihan, suatu tindakan penyalahgunaan kekayaan yang tidak dapat dibenarkan.
3. Negara mempunyai hak untuk mengintervensi produksi agar negara dapat mencapai batas minimal produksi komoditas pokok, dan sekaligus menjamin tidak berlebih-lebihannya produksi atau tidak terlampaui melebihi batas maksimal. Kendali produksi oleh swasta tanpa arahan dari otoritas hukum, tentu saja akan memunculkan produksi massal yang berlebihan di satu sisi, dan di sisi lain batas minimal tidak tercapai. Arahan otoritas hukum sangat dibutuhkan untuk menjamin agar produksi masyarakat tetap berada di antara dua batas, baik batas atas maupun batas bawah, sehingga tidak akan terjadi pemborosan dan kelangkaan.

*b. Konsepsi Komoditi dalam Perdagangan Menurut Kapitalisme*

Komoditi adalah hasil produksi, ekonomi kapitalis mendasarkan distribusi barang hasil produksi atau distribusi komoditinya berdasarkan uang. Nilai uang dalam ekonomi kapitalis termuat dalam empat porsi, yaitu

- upah adalah bagian (share) untuk buruh atau pekerja sebagai faktor utama dalam proses produksi.
- bunga merupakan bagian dari modal pinjaman.
- upah adalah, biaya sewa, dan profit atau keuntungan.
- profit adalah, bagian untuk modal keseluruhan yang digunakan dalam proses produksi.

Upah dan profit atau keuntungan diletakkan dalam satu kelompok, karena dalam pandangan ekonomi kapitalis profit adalah suatu bentuk upah bagi jenis kerja tertentu, yakni kerja pengorganisasian yang dilakukan oleh pengusaha yaitu, ia mengumpulkan faktor-faktor produksi yang berbeda, seperti kekayaan alam, modal, dan buruh, lalu mengalokasikan dan mengorganisasikan mereka dalam proses produksi.

#### **4.3. Pelembagaan Sistem Ekonomi Kapitalisme**

##### **a. Dominasi Positivisme**

Kemapanan kapitalisme sangat ditentukan oleh dominasi positivisme, sebagai logika fisafat yang mendekati dan memahami objek berdasarkan rangkaian data empiris dan perhitungan



matematis, dan tiang penyangga pengetahuan ilmiahnya adalah pengalaman dan pengamatan atas objek yang dicerap dan dialami sebagai data atau fakta yang pasti, dan tujuan pengamatannya adalah menemukan kaitan dan hukum yang bekerja dan mengatur objek, sehingga dapat dibuat prakiraan yang masuk akal. Sebagai sebuah aliran filsafat atau cara berfikir, pada dasarnya positivisme bukanlah suatu cara berfikir yang harus ditinggalkan, tetapi penguasa-penguasa kapitalis mengalihfungsikan logika berfikir positivisme untuk memapankan dominasi kapitalisme melalui dominasi positivisme dengan cara sebagai berikut:

#### *Peralihan Menjadi Masyarakat Teknologos*

Teknologi adalah suatu keniscayaan karena dimana pun, sampai kapan pun, manusia senantiasa memerlukan sarana dan prasarana yang dapat mempermudah dan mendukung manusia agar dapat memenuhi semua kebutuhan hidup, serta untuk menjinakkan keganasan dan keliaran alam, dengan demikian teknologi bukanlah suatu bahaya sejati, mengingat teknologi dapat mendatangkan kemelaratan, dan kelimpahan, dapat mendatangkan kemudahan, atau pun dapat menyebabkan duka nestapa, bahaya sejati terletak pada manusia yang menjadi pengguna teknologi. Namun ada suatu titik ambivalensi dalam teknologi<sup>43</sup>, titik kemenduaan teknologi adalah bahwa teknologi dapat sangat bermanfaat namun juga dapat sangat

---

<sup>43</sup> Opcid. hal 200

membahayakan yaitu pada saat era pra teknologi manusia masih berkuat dengan kesusahan dan ketidakmudahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, manusia masih menjadi tuan bagi hidupnya sebagai subjek yang otonom dan rasional.

Pada era teknologi, yang puncak pada revolusi industri dengan aneka ragam penemuan yang revolusioner diberbagai bidang, telah merubah mentalitas, gaya hidup, dan pola fikir manusia. Kehadiran teknologi di segala bidang melahirkan kemakmuran material, kenyamanan hidup, dan kemudahan dalam bekerja, beraktivitas, bahkan manusia pun mampu menundukkan alam, dan menjadi penguasa atas alam.

Dibalik kelimpahan material dan kemudahan, serta kekuasaan manusia atas alam, dimana manusia tidak lagi harus bekerja keras karena telah digantikan mesin, ternyata manusia, atau individu harus merelakan diri diatur dan diperintah oleh mesin yang direkayasa atau yang manusia ciptakan. Masyarakat kini menjadi masyarakat teknologos, terjadi penajaman perbedaan kelas dan fungsi sosial dan individu tertindas, terasing, dan disingkirkan dalam dunia kerja. Pada titik ini yang paling membahayakan bagi manusia adalah bahwa manusia hanya berharga sejauh menghasilkan, atau lebih tepat masih memiliki tenaga untuk bekerja karena peran dan fungsi manusia setara dengan peran dan fungsi yang dijalankan mesin. Kondisi ini secara

berkelanjutan yang menumpulkan nalar banyak individu dan memapankan ekonomi kapitalisme.

### **b. Administrasi Total**

Selain didukung oleh kemajuan teknologi, dominasi yang melanggengkan pelebagaan Sistem Ekonomi Kapitalisme adalah dirubahnya dominasi sistem kapitalisme tersebut menjadi administrasi total, yaitu strategi pengaturan dan pengelolaan yang bertujuan mengharmoniskan pemusatan dan penyatuan kekuatan sosial, politik, ekonomi, dan militer, dan budaya kedalam satu tangan. Sarana yang digunakan adalah menciptakan semusuh nasional bersama.

Administrasi total mengambil bentuk dalam manajemen ilmiah, yaitu satuan ilmu pasti dan industri raksasa. Manajemen ilmiah merupakan strategi pengelolaan hubungan antara kelas pekerja dan kelas majikan, dengan menggumakan satu ukuran hukum yang telah dimasukkan ke dalam mesin pintar, sehingga jika terjadi perselisihan tidak diperlukan lagi pertemuan untuk membicarakan jalan keuarannya, tetapi mesin akan memutuskannya. Tujuan dari administrsi total adalah kohesi sosial secara stabil dan permanen, sehingga semua aktiitas akan berjalan lancar, yang terpenting dalam ekonomi dan teknologi bukanlah pengembangan kemampuan berfikir manusia, bukan pula keseimbangan antara hak dan kewajiban, melainkan

kontribusi kepada sistem, dan menghasilkan sesuatu yang berguna secara sosial.

Media utama administrasi total adalah bahasa, yang merupakan ungkapan kemampuan berfikir dan proses perwujudan potensi individu, karena ini para penguasa kapitalis sangat menyadari bahwa dalam proses penaklukan individu adalah, dengan membentuk wacana berfikir, cara berkomunikasi, dan berbicara. Wacana pra teknologi oleh penguasa diubah dan diberi muatan baru yang lebih sesuai dengan realitas teknologis dengan menciptakan bahasa sendiri yaitu bahasa fungsional. Bahasa fungsional adalah bahasa dengan bangunan kata yang bermakna simbolis dan politis, dengan menghilangkan fungsi subjek dan predikat. Bahasa fungsional diletakkan dalam wacana dominasi dan eksploitasi, individu, masyarakat, dan alam. Bahasa fungsional adalah penggunaan kata atau kalimat yang selalu berkonotasi politis atau diarahkan sesuai dengan kepentingan kapitalisme. Dengan demikian bahasa berfungsi sebagai perangkat operasional.

#### *a. Metode Bahasa Fungsional*

Bahasa fungsional bertujuan untuk membangkitkan respon dan pengertian pendengar untuk pemeliharaan kepentingan, status quo, mengelola konflik bagi para penguasa, dengan cara yang rasional, manusiawi, efektif, dan ramah. Selain itu, bahasa

fungsional dalam konteks kekuasaan berfungsi juga sebagai instrumen koordinasi dan subordinasi, sebagai bahasa kekuasaan, mengkomunikasikan keputusan, peraturan, perintah, larangan, tolok ukur, dan pedoman bagi semesta konsep, sistem nilai, dan realitas yang berbeda dan dicurigai<sup>44</sup>. Dominasi terhadap wacana ilmiah individu dan masyarakat oleh bahasa fungsional yang digunakan oleh penguasa kapitalisme sudah demikian menguasai nalar dan pikiran individu dan masyarakat, kemampuan menggunakan nalar dialektis musnah oleh bahasa teknologis. Contoh bahasa fungsional dibidang bisnis fashion misalnya, yang menyebut wanita atau pria “*metroksesual*”.

Bahasa fungsional membuat hilangnya nalar dialektis kritis dari diri individu dan masyarakat, dan rasio manusia terletak dalam skema bahasa teknologos, sehingga kekuatan antagonistik dan kritis individu dan masyarakat ditaklukkan oleh bahasa-bahasa operasional dan fungsional. Manusia dikuasai dan didominasi dalam peradaban yang telah dirancang secara sistematis oleh kekuatan-kekuatan kapitalistik, kondisi menjadi semakin mengerikan ketika bahasa ekonomi kapitalistik ada dibalik bahasa pemerintahan, contohnya kata “Good Governance atau Pemerintahan Baik”, mengandung suatu nilai standar dalam pengambilan keputusan pemerintah yang harus selalu melibatkan tiga stake holder yaitu, pemerintah, komunitas, dan swasta. Kata-

---

<sup>44</sup> Valentinus Saeng, *Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global*, Hal.250

kata tersebut telah membawa dominasi industri-industri kapitalis di semua kebijakan dan keputusan ekonomi politik pemerintah.

Media lainnya yang juga digunakan untuk melembagakan kapitalisme adalah dengan melakukan penghapusan sejarah. Kesadaran historis dan kesadaran kritis adalah dua syarat bagi terjadinya perubahan, dengan adanya kesadaran historis individu dan masyarakat dapat menyadari relitas sosialnya, dan ketika kesadaran terhadap realitas sosial tersebut dibahasakan oleh kesadaran kritis dengan menggunakan bahasa ilmu pengetahuan maka perubahan akan dapat terjadi. Oleh karena kepentingan untuk memelihara *status quo* oleh penguasa kapitalis, maka pertalian masa lalu dan masa kini diputus dalam masyarakat<sup>45</sup>.

#### *b. Administrasi Total dalam Keputusan Pemerintahan*

Contoh mengenai bahasa fungsional dan pemutusan tali sejarah di Indonesia, yang dapat disinkronisasikan dengan teori Herbert Mercuse tentang *administrasi total* adalah pada konsepsi-konsepsi ekonomi politik yang ditawarkan oleh lembaga keuangan internasional pada proses perbaikan ekonomi Indonesia setelah mengalami krisis di Tahun 1998. Salah satu obat yang ditawarkan Bank Dunia (World Bank) adalah efisiensi sektor publik atau perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN). Efisiensi sektor publik dapat dicapai dengan melakukan privatisasi. Berikut adalah tabel deferensiasi perusahaan-perusahaan milik negara (State

---

<sup>45</sup> Ibid. hal.252

Owned Enterprises/SOE) yang menjadi panduan bagi banyak ahli ekonomi Indonesia untuk mengawal reformasi ekonomi di Indonesia:

Tabel 1: Diferensiasi Perusahaan Sektor Publik

No	Struktur Pasar	Efisiensi	Tujuan Sosial/ Eksternal	Opsi Privatisasi
1	Competitif	Tinggi	Rendah	Membangun kompetisi dengan menghilangkan proteksi, dan dengan pelepasan secara penuh
2	Competitif	Tinggi	Tinggi	Transfer manajemen dan pengkondisian ke pasar
3	Competitif	Rendah	Rendah	Go publik – pelepasan secara penuh
4	Kompetitif	Rendah	Tinggi	Konversi modal, sub kontrak, join venture, dan pengkondisian ke pasar
5	Monopoli	Tinggi	Rendah	Membangun kompetisi, untuk memasuki dan membuka kompetisi internasional
	Monopoli	Rendah	Rendah	Go publik-pelepasan secara penuh
	Monopoli	Rendah	Tinggi	Membangun kompetisi, dan membagi perusahaan menjadi unit-unit
	Monopoli	Tinggi	Tinggi	Peraturan dengan menggunakan opsi non-pelepasan atau pemberian insentif pada dilusi modal

Sumber: Bank Dunia<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Miranda S Goulton, *Essat in macroeconomic Policy: The Indonesian Experience*, Gramendia, 2008, Hal.551

Pada tabel diatas, ditunjukkan bahwa pembenahan ekonomi adalah dengan melakukan reformasi ekonomi yang dapat dilakukan dengan:

a. Transfer Kepemilikan:

- a) Dilepas secara penuh ke : - sektor swasta
  - Pasar Modal
- b) Dilepas sebagian ke : - Publik
  - Tenaga kerja
  - Join venture

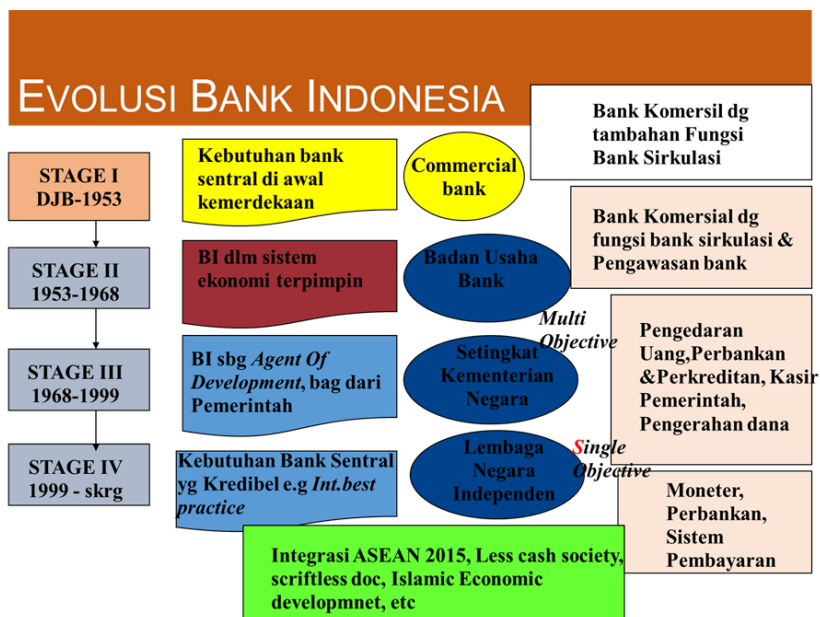
Contoh jalan keluar yang diberikan tersebut, menunjukkan hasil yang sangat luar biasa, banyak sekali perusahaan-perusahaan milik negara yang *go publik* atau dalam rangka ini ditransfer kepemilikannya, seakan terputus sudah sejarah yang mengamankan kepemilikan sektor publik kepada masyarakat yang diwakili oleh negara, dan amanah untuk tidak menggunakan ekonomi kapitalisme (UUD 1945 Pasal 33). Kepemerintahan yang baik dengan reformasi ekonomi, privatisasi pada akhirnya menggiring Indonesia menggunakan sistem ekonomi kapitalisme. Hal ini menunjukkan pembuktian tentang administrasi total dalam pelemagaan sistem ekonomi kapitalisme.

Contoh lainnya adalah bahwa setelah berakhirnya era Presiden soekarno dan beralih ke Presiden Soeharto, terjadi perubahan pada kebijakan ekonomi politik, yang paling significant terjadi pada 1983 – 1985, beberapa perubahan sebagai berikut,



*Pertama*; deregulasi terhadap prinsip-prinsip operasinalisasi bank yaitu menghilangkan control terhadap suku bunga deposito dan pinjaman. *Kedua*; pemberian kredit kepada masyarakat yang dikelola langsung oleh Bank Indonesia, beralih ke mekanisme pasar yaitu dengan adanya SBI (Surat Bank Indonesia) dan SBPU (Surat Berharga Pasar uang) atau Money Market Securities<sup>47</sup>.

Lebih jauh perubahan terhadap fungsi Bank Indonesia ini dapat menunjukkan peranan dan kendali Negara dalam perekonomian perubahan tersebut adalah sebagai berikut<sup>48</sup>:



<sup>47</sup> Ibid. hal 495

<sup>48</sup> Kasmir, Bank dan Lembaga keuangan Lainnya, PT Raja Safindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 15-20

Terlihat bahwa perubahan fungsi yang sangat drastic terjadi pada masa pemerintahan BJ. Habibie yaitu bank Indonesia berfungsi sebagai Lembaga Negara Independence. Kebijakan lainnya pada era Presiden bacharuddin Jusuf Habibie, berbagai kebijakan ekonominya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan Pengelola asset Negara
2. Melikuidasi bank-bank yang bermasalah
3. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri
4. Mengesahkan UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang tidak sehat
5. Mengesahkan UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Setelah era pemerintahan BJ. Habibie pemerintahan beralih ke era Abdurrahman Wahid, tidak terjadi perubahan yang significant terhadap berbagai kebijakan ekonomi yang menunjukkan peran dan kendali Negara terhadap perekonomian, namun terjadi perubahan yang sangat penting mengenai hal ini pada masa pemerintahan Presiden Megawati yaitu privatisasi terhadap BUMN dan penjualan saham indosat<sup>49</sup> sebagai BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi. Melihat perubahan-

---

<sup>49</sup> Diunduh di google pada 10 Desember 2014, pada <https://reffisoebago4.wordpress.com/2013/09/10/kebijakan-presiden-bj-habibie-sampai-presiden-megawati/diposting-pada-September-10-2013>

perubahan tersebut dapat dinyatakan bahwa Negara Indonesia telah melakukan perubahan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi ekonominya, yang paling mendasar adalah pada asas usaha bersama yang diwujudkan pada kepemilikan lembaga-lembaga ekonomi strategis oleh Negara. Momentum perubahannya ditandai pada Tahun 1998 yang dinyatakan sebagai orde reformasi Indonesia dengan berakhirnya era pemerintahan Presiden Soeharto. Perubahan yang ada menunjukkan bahwa Indonesia tampaknya menggunakan system ekonomi kapitalisme yang sangat ditentang oleh konstitusi dasar Indonesia yaitu UUD 1945. Tampak bahwa metode administrasi total merupakan cara efektif dalam memapankan sistem ekonomi kapitalis, dan benar yang dinyatakan oleh Francis Fukuyama in his book *The End of History* “*Liberal Democracy may constitute the end point of mankind ideological evolution and the final form of human government*”<sup>50</sup>.

### c. Sosialisasi Kebutuhan Palsu

Metode selanjutnya dalam pelebagaan sistem ekonomi kapitalis adalah dengan sosialisasi kebutuhan palsu. Melalui media massa, televisi, internet, iklan-iklan, individu dan masyarakat seolah sudah dituntun dan dikondisikan pilihannya, insting dan kesadaran individu mengenai kebutuhannya

---

<sup>50</sup> Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man*, The Free Press, New York, 1992, hal.3

diidoktrinasi dan dibombardir oleh citra produk yang senantiasa dipromosikan. Secara sistematis dan kontinu pilihan dan keputusan individu dan masyarakat mengenai kebutuhannya terpropaganda oleh citra produk-produk yang ditawarkan penguasa atau pengusaha kapitalis. Kecanggihan teknologi seluruh industri memberikan ruang kebebasan dan kemudahan bagi individu dan masyarakat untuk memenuhi semua instingnya, sehingga terjadi pergeseran makna dari tidak penting menjadi penting, atau irrasional menjadi rasional, tidak dibutuhkan dan dibutuhkan. Melalui propaganda kebutuhan palsu ini kapitalisme meraih kemenangan.

Selain beberapa metode di atas, *imperium citra* merupakan metode yang juga menyokong kelanggengan sistem kapitalisme, *imperium citra* adalah pemikiran dan pertimbangan penguasa atau pemerintah yang bertempu dan mengedepankan atau berorientasi pada citra diri di mata masyarakat, rakyat dianggap sebagai objek dari kekuasaan dan pembangunan. Dengan demikian, sikap yang diambil penguasa hanya mempunyai dua dimensi, di satu pihak menjamin kerja sama dan toleransi minimum dengan kalangan oposisi di pihak lain menciptakan citra baik dan murah hati di kalangan rakyat jelata, yang hal ini menyebabkan beralihnya pola pemahaman, penilaian, dan pemaknaan eksistensi manusia, realitas sosial, dan fungsi kekuasaan, tata hidup dalam bernegara tertuju pada sensasi, bungkus lebih penting dari isi, kesan lebih penting dari substansi, peran lebih penting dari pada jati diri.

#### **4. Pelembagaan Ekonomi Islam Melalui Pendidikan Tinggi Islam**

Ekonomi Kapitalis dengan demikian adalah sistem ekonomi yang tidak memberikan rumusan akan adanya keadilan sosial, bahkan dengan mendasarkan sistemnya pada prinsip-prinsip kebebasan individu sistem ekonomi kapitalis menyebabkan lahirnya penindasaan dan penguasaan oleh penguasa kapitalis terhadap individu dan masyarakat. Pelembagaan dan kemapanan kapitalis ternyata bukan karena keistimewaan sistemnya melainkan karena adanya indroktinasi ideologis yang senantiasa dipropagandakan melalui media-media yang secara efektif dapat mempengaruhi dan merubah cara hidup, cara pandang, cara berfikir, budaya, dan pilihan hidup individu dan masyarakat. Maka dari itu, menggunakan logika dialektis dari Karl marx, jika ekonomi Islam dapat dianggap sebagai sintesis dan ekonomi kapitalis adalah antitesis, maka dibutuhkan usaha berkesinambung untuk melakukan perubahan.

Sejalan dengan ekonomi Islam yang mendasarkan prinsipnya pada sifat-sifat baik manusia, dan sejalan pula dengan kenyataan bahwa kemapanan pelembagaan ekonomi kapitalis adalah melalui indoktrinasi ideologis yang menguasai dan menindas nalar individu dan masyarakat, maka perubahan harus dimulai dengan indoktrinasi ideologis pula, namun untuk tujuan memperbaiki nalar dan moral individu dan masyarakat.

Indoktrinasi ini dapat dilakukan melalui media pendidikan, karena hanya melalui media pendidikan dapat dilakukan dekontruksi nilai-nilai, norma, kebiasaan, dan cara berfikir atau nalar yang telah terbentuk.

*a. Pendidikan Tinggi Islam dan Pembangunan Logika Berfikir Kritis*

Peradaban manusia sampai saat ini terbangun di atas landasan logika dialektis Plato dan Logika analitis Aristoteles. Logika dialektis Plato adalah struktur logika berfikir yang didasarkan atas dialektika terhadap gagasan atau ide dengan realitas, memutuskan kebenaran atas ada dan atas tidak adanya sesuatu setelah adanya kesesuaian terhadap bukti-bukti empiris, data dan fakta. Selanjutnya logika analitis Aristoteles adalah landasan logika atau struktur berfikir yang didasarkan atas formalisasi logika, yakni menyimpulkan suatu persetujuan atau penyangkalan melalui bangunan premis mayor sebagai generalisasi dan premis minor sebagai definisi, premis minor sebagai turunan atau sebagai definisi dapat mengiyakan atau menyangkal premis mayor sebagai dasar atau sebagai generalisasi dan ditutup dengan kesimpulan. Kedua logika berfikir ini merupakan cara berfikir yang menunjuk kepada realitas dan pembuktian, dan disebut sebagai filsafat positivis. Berdasarkan kedua logika berfikir ini kebenaran ilmu pengetahuan berdiri di atas landasan prasyarat ilmiah yang diperoleh melalui eksperimen,

observasi, kumpulan data-fakta, penghitungan, pengujian, dalil, pengukuran, dan sebagainya. Prasyarat ilmiah tersebut terwujud dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mendominasi. Dominasinya tampak pada disiplin ilmu pasti seperti matematika, fisika, dan disiplin ilmu lainnya. Dominasi disiplin ilmu pasti ini terkadang menganggap rendah cara berfikir yang tidak didasarkan pada observasi, penghitungan, dan eksperimen, seperti metafisika, logika dan idealisme.

Dominasi empirisme dan logika positivistik terjadi secara berkelanjutan dan berkelindan dengan kemajuan teknologi, pada akhirnya melahirkan peradaban yang berdiri di atas landasan nalar teknologis. Nalar teknologis adalah cara berfikir dengan sudut ilmiahnya atau ilmu pengetahuannya memandang alam hanya sebagai objek yang mesti ditundukkan dan dikuasai. Manusia pun menjadi objek seperti halnya alam, yaitu relasi personal dan emosional antar individu kehilangan makna dan kekayaannya dan disempitkan pada relasi matematis maupun logis<sup>51</sup>.

Dengan demikian dalam rangka meluruskan pemikiran atau cara berfikir atau logika individu dan masyarakat, pada dasarnya indoktrinasi yang harus dilakukan bukanlah dengan mengubah, menyalahkan dan tidak menggunakan logika empiris – positivis analisis karena sebagai lembaga yang merupakan tempat

---

<sup>51</sup> Opcid, hal. 275

yang dapat digunakan untuk “mengembangbiakkan nalar” lembaga pendidikan tinggi Islam dapat memformulasikan mengenai formula indoktrinasi tujuan keadilan sosial yang menjadi nilai dasar dari sistem ekonomi Islam. Indoktrinasi dilakukan untuk membangun kesadaran kritis tentang sistem ekonomi yang saat ini berlaku dan mengatur kehidupan seluruh manusia, dan secara empiris dan dialektis memberikan pemahaman serta kesadaran tentang perilaku kehidupan sosial manusia, kerusakan alam, patalogi sosial, dehumanisasi manusia, alienasi nilai kerja, dan sebagainya yang merupakan sebuah akibat sistematis dari suatu sistem ekonomi yang diterapkan.

Pemahaman mengenai kedua sistem dengan demikian menjadi perlu, agar dapat dilakukan rekonstruksi nilai dan peradaban dalam diri setiap individu. Seperti telah diketahui bahwa keberhasilan pelembagaan sistem ekonomi kapitalis adalah dari indoktrinasi nilai positivistik dan kemudian berubah menjadi nalar teknologis, yakni merubah nilai-nilai dasar kemanusiaan, maka materi indoktrinasi yang sangat penting adalah tentang keluhuran sifat manusia yaitu adanya kemampuan untuk membatasi diri dari berlebih-lebihan, hal ini tentu saja sangat bertolak belakang dengan dasar ekonomi kapitalis seperti yang diungkapkan Adam Smith dalam bukunya “The Wealth of Nation” yaitu teori invisible hand yang dalam bukunya “The Moral Sentiment” diketahui bahwa teori Invisible hand berpihak dari dimensi kerakusan yang ada dalam diri manusia.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perbedaan Teori Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis tentang Kepemilikan, distribusi, dan produksi

Islam mengizinkan individu memiliki hak-hak khusus atas sumber-sumber alam dalam batas-batas yang telah digariskan oleh teori umum Islam tentang distribusi faktor-faktor produksi atau distribusi praproduksi. Perbedaan teoritis mengenai hak-hak kepemilikan ini berbeda dari ketentuan Ekonomi Kapitalis.

Doktrin Ekonomi Kapitalis mengizinkan setiap orang untuk memiliki seluruh jenis sumber kekayaan alam atas dasar prinsip kebebasan ekonomi. Individu bebas dan dapat memandang bahwa setiap kekayaan alam yang dikuasainya sebagai hak milik pribadi. Jangkauan kebebasan kepemilikan pribadi ini dibatasi oleh kebebasan kepemilikan individu lain. Dengan demikian, individu mendapat justifikasi atas kepemilikannya sekedar berdasarkan fakta bahwa individu tersebut tidak mengganggu kebebasan orang lain.

Namun, Teori Umum Ekonomi Islam tentang kepemilikan kekayaan dan tentang distribusinya tidak mengakui

kebebasan kepemilikan privat seperti halnya dalam pengertian Kapitalis. Teori Islam memandang bahwa hak individu atas sumber-sumber alam terkait dengan kepemilikannya atas hasil kerjanya yang berkesinmbungan dalam mengeploitsinya.

Ekonomi Islam mendasarkan teori produksinya sesuai dengan kerja yang dilakukan individu, sifat-sifat atau watak baik dalam diri manusia, dan berdasarkan doktrin keadilan sosial, sedangkan Ekonomi Kapitalis mendasarkan perkembangan produksinya berdasarkan sifat kerakusan dalam diri individu yaitu tidak akan pernah merasa cukup, sifat ini merupakan *invisible hand* yang membuat produksi terus berkembang

2. Ketidakmapanan Ekonomi Islam bukanlah karena Ekonomi Islam tidak memiliki teori-teori dasar yang menjadi landasan bagi berkembangnya suatu sistem ekonomi, Islam memiliki teori-teori dasar tersebut yaitu tentang Kepemilikan, distribusi kekayaan, dan teori produksi yang meliputi pra produksi dan pra produksi. Ketidak mapanan Ekonomi Islam adalah karena Negara dan Pemerintah sebagai pelaksana negara mendasarkan keputusan ekonominya tidak menggunakan aturan-atauran Ekonomi Islam. Sedangkan kemapanan Ekonomi Kapitalis adalah karena propaganda perubahan logika, dan

peradaban individu dan masyarakat melalui beragam cara yaitu melalui administasi total, melalui propaganda media, melalui propaganda bahasa fungsional, dan melalui dominasi logika positivisme yang begitu mengakar dalam jiwa setiap individu. Cara-cara ini dilakukan atau ditebarkan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, yang menjadi ruang kosong dalam Ekonomi Islam adalah tidak adanya pemerintah yang mempunyai keterpaduan untuk membuat kebijakan berdasarkan aturan dasar ekonomi Islam yang benar-benar sesuai dengan doktrin ekonominya.

3. Upaya pelembagaan Ekonomi Islam melalui Pendidikan Tinggi Islam adalah dengan memberikan muatan-muatan perbandingan antara ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis, muatan-muatan pendidikan yang dapat merubah cara berfikir individu dan masyarakat tentang kebutuhan hidup, tentang kebutuhan materi, tentang kepedulian, dan sebagainya yang terkait dengan upaya mengemblikan nilai-nilai humanisme berdasarkan tuntunan ajaran Islam. Selain itu upaya yang paling penting yang harus dilakukan oleh Pendidikan Tinggi Islam adalah mengembangkan Logika atau cara berfikir yang dapat mengcounter logika positivistik.

## **B. Saran**

Saran penelitian ini adalah:

1. Pendidikan Tinggi Islam merupakan tempat yang strategis untuk mengembangkan sistem ekonomi berdasarkan aturan-aturan Islam, sehingga perlu dilakukan kajian perbandingan yang mendalam, kajian-kajian tentang metode pengembangannya.
2. Pendidikan Tinggi Islam harus memperdalam dan mengembangkan kajian-kajian teori dan aturan dasar Islam tentang sistem ekonomi yang masih tersembunyi dalam teks-teks Islam yaitu al-Quran dan Hadist. Metode yang digunakan dapat dengan menentukan aturan – aturan ordonansi ekonomi Islam dan menentukan struktur atas dan struktur bawahnya yaitu aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan Hadits.
3. Kajian Al-Qur'an dan Hadits dengan demikian seharusnya juga dikembangkan secara kontekstual di program-program studi ekonomi termasuk pendalaman Bahasa Arab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, Yayasan Swarna Bhumi, Jakarta, 1997
- Ash Shadr, Baqir Muhammad, *Buku Induk Ekonomi Islam*, Zahra Publishing, Jakarta, 2008
- Ayson, Florentino. *Fundamental of Political Ideal*, National Book Store, Manila, 2000
- Bremer, Ian, *The End of Free Market*, Gramedia, Jakarta, 2002
- Fukuyama, Francis, *The End of History and The Last Man*, The Free Press, New York, 1992
- Goeltom, Miranda S, *Essay in Macroeconomics Policy: The Indonesia Experience*, Gramedia, Jakarta, 2008
- Harjono, Anwar. *Perjalanan Politik Bangsa*,
- Hatta, Moh. *Persoalan Ekonomi Sosialis Indoneisa*, Djambatan, Jakarta, 1926
- Harold, J.Laski. *State in Theory and Practice*, The Viking Press, New York, 1947
- Russell, Betrand. *Political Ideal (Cita-Cita Politik)*, Amrico, Bandung, 1963
- Saeng, CP, Valentinus, *Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global*, Gramedia, Jakarta, 2012
- Soekarno. Ir, *Dibawah Naungan Bendera Revolusi*, Djambatan, Jakarta, 1921
- Soltou, Roger. *An Introduction to Politics*, Longmans, London, 1961

Syafei , I.K. & Azikin, *Perbandingan Pemerintahan*, Refika  
Aditama, Bandung, 2007

Zaidan, Abdul Karim Prof, Dr. *Pengantar Studi Syari'ah*, Robbani  
Press, Jakarta, 2008





Laporan Hasil Penelitian Kelompok

